

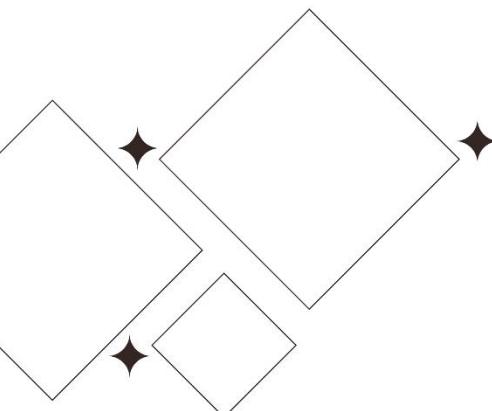
2025



PROSIDING

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

“Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045:
Optimalkan Bonus Demografi yang Berkelanjutan”



Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Tahun 2025



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Prosiding Karya Ilmiah

Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2025

Hak cipta dilindungi Undang – undang

copyright @ 2025

ISSN : 2622 – 4232

Penyunting : Abdul Afif

Freska Dinta Julfiana

Okta Fika Rahmarda

Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Alamat Penerbit : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi
(UNISRI) Surakarta. Jl. Sumpah Pemuda No. 18 , Joglo , Surakarta.

Kode pos : 571 36. Telp. (0271) 856521 .

Website : www.fisip.unisri.ac.id



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2025 ini. SRIPA 2025 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Politeknik Harapan Bersama dan Universitas Warmadewa.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Optimalkan Bonus Demografi yang Berkelaanjutan. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si, Riska Wirawan, S.Sos, M.Si dan Wirid Winduro, S.Si, M.Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Abdul Afif, Freska Dinta Julfiana dan Okta Fika Rahmanda yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Optimalkan Bonus Demografi yang Berkelaanjutan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam prosiding ini

Surakarta, 12 Mei 2025

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi



Ara Tamayanti Suhita, M.Si

NIPY. 01940175



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

DAFTAR ISI

Implikasi Social Media Detox Menuju 2045: Mengikis Ketergantungan Digital Gen-Z Oleh: Chandra Adjie Prianggodo, Paper.....	5
Membangun Kebijakan Pendidikan yang Adaptif Menyongsong Indonesia Emas 2045 Oleh: Farco Siswiyanto Raharjo, Paper.....	29
Kebijakan Pendidikan Adaptif perkembangan Teknologi. Optimalisasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan SDM Unggul di Daerah 3T Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Rega Firmansyah, Essay.....	46
Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Peningkatan SDM Uunggul Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Raka Kurniawan, Essay	49
Peran Generasi Z Dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum yang adil dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Dea Lola Syahrani, Essay	57
Menjadi Suara Keadilan: Peran Generasi Z Dalam Pengawasan Hukum Indonesia Oleh: Dwi Ardhani, Essay	61
Menenun Asa, Menata Bangsa dalam Reformasi Kebijakan Pendidikan Demi SDM Unggul 2045 Oleh: Davina Nathania Lieyanto & Jawza Nur Maulida, Essay	65
Peran Generasi Z Dalam Tantangan Politik dan Kebijakan Publik Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Ikhsan Arya Mahendra, Essay	68
Mengoptimalkan Partisipasi Generasi Z Dalam Pengambilan Keputusan Politik Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Dimas Junian Fadhillah & Hafids Haryonno, Essay	71
Sekolah Bukan Pabrik, Murid Bukan Produk: Merancang Kebijakan Pendidikan yang Melahirkan SDM Unggul Oleh: Utria Windi Arsih & Siti Zahra Yundi Afi, Essay	77
Peran Generasi Z Dalam Tantangan Politik dasn Kebijakan Publik Indonesia Emas 2045 Oleh: Muhammad Isa Apdiyan Wisanggeni, Essay	82
Peran Generasi Z Dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum yang Adil dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Andika Umbu Tiba & Ni Luh Putu Ratih Prabandewi, Essay	85
Suara Aktifis Dalam Menolak RUU TNI Demi Menjaga Profesionalisme Militer dan Demokrasi Oleh: Aprilia Marthen Patabang, Essay	88



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Implikasi Social Media Detox Menuju 2045: Mengikis Ketergantungan Digital Gen-Z

Oleh: Chandra Adjie Prianggodo, Paper

Dosen Umum

Email: chandraadjie29@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan media sosial telah banyak membawa disrupti bagi ekosistem digital global. Perkembangan media sosial semakin menemukan pola nya karena tidak ada penolakan dari masyarakat dunia. Kemunculan platform Facebook, Instagram, TikTok dan Youtube adalah serangkaian terobosan baru yang berhasil mempengaruhi perilaku generasi muda. Perkembangan media sosial melahirkan kecanduan berlebih, dengan tingkat gandrung dan antusiasme tinggi. Beberapa penelitian menemukan dampak kecanduan media sosial akan berorientasi pada melemahnya produktifitas individu. Gejala seperti takut tertinggal, lalai dari tanggungjawab dan cyberbullying adalah serangkaian dampak lanjutan lain yang tidak kalah vital. Media sosial mewadahi pertukaran informasi secara cepat dan luas dalam hitungan detik, sehingga orang-orang di seluruh penjuru dunia dapat saling berbagi pengaruh. Penelitian ini bertujuan mengukur implikasi social media detox terhadap Generasi Z Indonesia di 2045. Dependency media theory, work-life balance theory dan social media detox theory merupakan serangkaian pisau analisis relevan untuk mengurai pendekatan penelitian. Metode studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai referensi relevan dan menganalisis secara mendalam agar memenuhi kualitas ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan tingginya pengaruh media sosial secara teori terjadi karena para user gagal mengendalikan diri, sehingga efektifitas media sosial sebagai jejaring komunikasi gagal diciptakan. Dalam rangka mengupayakan kesiapan Generasi Z memanfaatkan bonus demografi 2045, social media detox adalah visi paling efektif digencarkan oleh seluruh pihak terutama pemerintah.

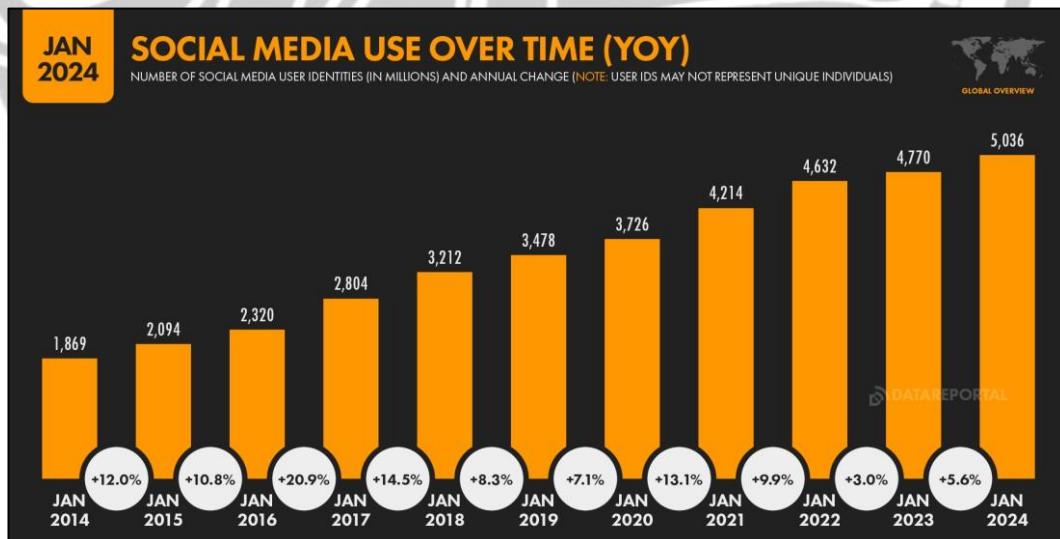
Kata Kunci: Media Sosial, Generasi Z, Demografi

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

BAB I PENDAHULUAN

Keberadaan media sosial saat ini telah banyak membawa disrupsi bagi kehidupan masyarakat global. Cara berinteraksi, berkomunikasi dan cara berekspresi masyarakat global tidak memiliki sekat sama sekali. Media sosial menciptakan ruang baru agar dunia saling terhubung. Perkembangan media sosial semakin menemukan pola nya karena tidak ada penolakan dari masyarakat dunia terutama generasi muda. Kemunculan *platform Facebook, Instagram, TikTok* dan *Youtube* adalah serangkaian fenomena media sosial yang berhasil mempengaruhi perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.

Rafiq (2020) menjelaskan media sosial merupakan bagian dari pesatnya kemajuan internet dan teknologi yang berhasil membentuk pola komunikasi praktis antar *user*. Media sosial seolah menjembatani hasrat masyarakat untuk saling menjalin ikatan sosial meski secara virtual. Tren *Smartphone* dalam satu 1 dekade terakhir mampu bertahan sebagaimana tingginya minat pengguna dari masyarakat global. Personalisasi yang ditawarkan media sosial dan didukung dengan kemudahan akses pada akhirnya semakin membentuk *super social relationships*.



Gambar 1. Grafik Peningkatan Pengguna Medsos

Sumber: datareportal.com (2024)



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari seolah menjadi integral bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat mulai dari interaksi, relasi, hiburan, musik bahkan pekerjaan. Masyarakat tidak terikat dengan aturan media sosial, namun secara inisiatif mereka mengikatkan diri. Laporan Tinjauan Global Digital dari tim.

DataReportal di awal (2024) merilis total kumulatif pengguna aktif media sosial di dunia sebanyak 5,04 miliar. Data *Social Media User Over Time* sebagaimana dirilis tim DataReportal menunjukkan peningkatan signifikan. Kurun waktu 12 tahun terakhir (2014-2024), pengguna media sosial meningkat sebesar 266 juta dengan rerata pertumbuhan tiap tahun 5,6 persen, atau berkisar hampir 730.000 pengguna baru lahir setiap hari.

Eksistensi media sosial memudahkan setiap *user* dapat dengan bebas mengakses selama mereka berkemampuan baca tulis. Membludaknya ekosistem media sosial dikuatkan dengan kekhawatiran perusahaan-perusahaan media *mainstream* sebagai entitas pers dan bisnis. Dewan Pers Indonesia pada Desember (2023) merilis jurnal berisi kekhawatiran media konvensional dalam multi perspektif yakni: (1) komunitas media semakin kehilangan pasar karena merosotnya jumlah pembaca, pendengar dan penonton, (2) komunitas media semakin kehilangan sumber pendapatan utama dari iklan, (3) persaingan media konvensional dengan media sosial semakin rumit karena keberadaan media sosial begitu masif dan kaya dengan fitur atau konten seperti teks, audio, video, grafis dan animasi.

Kondisi sebagaimana kekhawatiran media-media *mainstream* merupakan fenomena lama yang gagal bersaing dengan eksistensi media sosial. Kekhawatiran untuk berkompetisi dengan hegemoni media sosial tidak dapat dihindari, terlebih lagi setiap *user* media sosial dapat berperan layaknya seperti pewarta (wartawan). Setiap *user* dapat dengan mudah dan cepat membagikan, menceritakan, mengabadikan informasi dalam hitungan detik. Peran media *mainstream* di masa lalu telah diambil alih sepenuhnya oleh media sosial.

Keunggulan media sosial akhirnya melahirkan fenomena *overtime used social media*, dengan tingkat gandrung dan antusiasme tinggi masyarakat terutama generasi muda. Media sosial menjadi habitat baru mengekspresikan hasrat tanpa batas. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa *overtime used social media* memiliki dampak negatif, di antaranya: (1) Pertama, kecanduan media sosial membuat individu mengalami ketergantungan, tidak



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

melakukan aktivitas lain dan sukar mengalihkan pandangan dari *smartphone* (Fauziawati, 2015). (2) Kedua, di kalangan remaja sekolah, media sosial menghambat prospek dan tanggungjawab siswa dalam pengumpulan tugas serta prestasi cenderung menurun (Mim et al., 2018). (3) Ketiga, di kalangan umum, media sosial menciptakan bentuk kekerasan *online* seperti kekerasan seksual, *bullying* dan pertikaian hingga kejahatan (Utoro et al., 2020).

Healthline Media sebagai lembaga pemerhati kesehatan digital internasional, merilis hasil riset yang berbicara mengenai identifikasi kecanduan media sosial. Sekitar 10% penduduk Amerika mengalami kecanduan media sosial yang turut mempengaruhi peningkatan sinyal dopamin dalam otak. Sinyal dopamin berhubungan dengan gairah atau kesenangan, sehingga otak terus-menerus menerima aktivitas bermedia sosial sebagai reaksi khusus (Cherney, 2020).

Cakupan media sosial semakin menunjukkan perkembangan pesat sejak awal kemunculannya. Akses mudah dan murah adalah alasan logis untuk menjawab pertanyaan mengapa gandrung masyarakat dan generasi muda terhadap media sosial sangat tinggi? Pada dasarnya faktor pendorong perkembangan liar media sosial adalah kemajuan manusia di bidang IPTEK, sehingga serangkaian dampak negatif yang muncul di era sekarang mungkin tidak pernah terprediksi sebelumnya.

Tabel 1. Data Kecanduan Media Sosial by MotleyRice

Dampak Kecanduan	Platform (Prosentase)	Intensitas	Ulasan
- Rendah diri	<i>Tiktok</i> (83%) <i>Facebook</i> (68%)	- Anak-anak (tinggi) - Dewasa (tinggi)	Resiko kecanduan selalu meningkat. Melalui media sosial, setiap individu hanya bercengkerama dengan pikiran mereka sendiri, hingga melahirkan kecemasan berlebihan bahkan merasa diasingkan lingkungan
- Depresi	<i>Instagram</i> (47%)	- Milenial & Gen Z (sangat tinggi)	
- Gangguan tidur	<i>Pinterest</i> (35%)	- Orang Tua (pasif-rendah)	
- Takut tertinggal	<i>Tiktok</i> (33%)	*tren peningkatan waktu akses setiap tahun nya	

Sumber: (MotleyRice, 2024)



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dicermati bahwa media sosial berhasil mengubah gaya hidup masyarakat terutama Gen-Z. Media sosial menawarkan pertukaran informasi secara cepat dan luas dalam hitungan detik, sehingga orang- orang di seluruh penjuru dunia dapat saling berbagi pengaruh. Interaksi sosial tanpa batas dalam jagad media sosial memang melahirkan kemudahan bagi masyarakat. Namun di satu sisi media sosial menciptakan dinamika perubahan yang mengancam penurunan kualitas individu atau cenderung melemahkan jati diri.

Penelitian ini bertujuan mengukur mengukur implikasi *social media detox* terhadap Generasi Z Indonesia dalam menyambut bonus demografi di tahun 2045. Konsep *social media detox* banyak dikaji internasional, beberapa penelitian ilmiah bereputasi menegaskan manfaat *social media detox* utamanya mengurangi gesekan mental bagi pengguna. Manfaat lain adalah meningkatnya keseimbangan emosional karena tidak ada idealisme tinggi atau perasaan tertekan atas pencapaian orang lain. Maka dari itu penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang *social media detox* beserta orientasi ke depannya.

Gambaran mengenai bonus demografi dapat dilihat dari prediksi peningkatan penduduk usia produktif di Indonesia yakni usia 16-65 tahun. Saat usia Indonesia genap mencapai 100 tahun di 2045, kesempatan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat sangat terbuka. Momentum untuk mengurangi angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat diraih dengan optimisme. Artinya kesempatan sekaligus tantangan berjalan beriringan. Korea Selatan pada 1950 dinyatakan sebagai negara termiskin di Asia, namun seiring berjalanannya waktu mereka dapat membalik keadaan. Tiongkok sekitar tahun 90-an baru dapat mencapai kejayaan, karena di masa-masa sebelumnya mereka gencar melakukan pemberdayaan SDM dan investasi di bidang pendidikan (Nabila, 2022).



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi penelitian dalam memenuhi aspek ilmiah, berkualitas dan berkesinambungan. Di antaranya adalah:

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Sumber	Ringkasan
1	<i>To detox or not to detox? The impact of different approaches to social media detox strategies on body image and wellbeing</i>	<i>Journals Elsevier Body Image Volume 52.</i> (Seekis et al., 2025)	<i>Social media detox selama 7 hari memberi dampak positif terutama peningkatan perasaan positif (tidak merasa tertekan). Cara yang dilakukan adalah melakukan <i>reset</i> pembersihan pada <i>feed</i> TikTok/Instagram secara berkala</i>
2	Detox Sosial Media Sebagai Upaya Mengatasi Social Media Addiction dan FoMO (Fear of Missing Out)	<i>Jurnal Sosialisasi, Volume 9(3), 92-101.</i> (Ismi et al., 2022)	Pecandu media yang memasuki tahap FoMO (Fear of Missing Out) cenderung tidak peduli dengan perkembangan lingkungan sekitar. Mereka dominan berikut pada perilaku dan interaksi <i>online</i> tanpa arah yang jelas. Mereka mudah stress, kesepian, dan kecemasan berlebih hingga sulit mengatur jam tidur.
	Dopamine Detox sebagai praktik Zuhud Era Modern dalam Upaya Mengatasi Dampak Negatif Teknologi	<i>Jurnal Riset Agama Volume 4, Nomor 3.</i> (Ariq, 2024)	Cara paling efektif untuk mengurangi penggunaan media sosial adalah menerapkan konsep zuhud dalam ajaran Islam. Konsep zuhud berorientasi pada pemikiran sederhana yang fokus pada penempaan nilai spiritualitas dan menggunakan teknologi seperlunya.

Sumber: Literatur Review (2025)



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

1. Teori Ketergantungan Media (*Media Dependency Theory*)

Substansi teori ini berbicara tentang kuatnya hubungan antara individu dan media. ketergantungan seseorang terhadap media menciptakan pola pikir dan pola perasaan yang berangsur-angsur kuat, sehingga berpengaruh terhadap tindakan. Simbiosis antar lingkungan sosial dan individu mengalami ketimpangan, karena ketergantungan media menjadikan individu mengalami krisis interaksi. *Supply* informasi yang bertebaran di media sosial semakin mengakar pada setiap *user*, lalu berorientasi pada kebiasaan (Jung, 2017).

Media Dependency Theory berhubungan dengan kemampuan seseorang atau kelompok yang gagal mengontrol arus media. Teori ini merupakan manifestasi dari gejala-gejala sosial masyarakat modern. Masifnya perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan kecakapan manusia memanfaatkan teknologi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis interaksi sosial dan efek domino ketika arus informasi media sosial terdistribusi pada lingkungan tidak tepat.

2. Teori Keseimbangan Hidup (*Work-Life Balance Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Keseimbangan antara *real time* dan *social media time* sejatinya sukar diciptakan apabila kesadaran individu belum terbentuk. Secara substansi teori ini memberikan konsep kepada setiap individu untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan pribadi dengan cara manajemen waktu dan energi. Proporsi antara aktivitas dan tingkat stress harus berada dalam kurva seimbang jika menginginkan peningkatan kualitas hidup (Rincy & Panchanatham, 2014).

Teori ini dapat difungsikan untuk mengurai tingkat kesadaran Gen-Z dalam mengontrol kehidupan di waktu nyata dan kehidupan di waktu maya. Aktivitas Gen-Z dapat diukur berdasarkan produktifitas dan tanggungjawab di luar media sosial. Pengalaman individu dalam mengoperasikan media sosial merupakan abstraksi yang sulit untuk dicari kebenarannya. Maka dari itu teori *Work-Life Balance Theory* dapat dijadikan untuk menganalisis fakta dan data yang mengenai pola hidup ideal di tengah kuatnya ekosistem digital media.



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

3. Teori Detoksifikasi Media Sosial (*Social Media Detox Theory*)

Teori ini menjadi pisau analisis utama dalam penelitian sebagaimana topik utama dalam judul. Meski secara literatur akademik teori ini belum bersifat baku, namun perkembangan konsepnya relevan dengan dinamika penggunaan media sosial berlebih. Konsep *social media detox* dari beberapa penelitian seperti:

- a) Istilah *social media detox* sama seperti *detox* diet untuk membuang racun dari dalam tubuh. *Detox* pada media sosial sama dengan membuang racun yang menekan diri (mengganggu) mental (Astuti & Subandiah, 2020).
- b) *Detox* media sosial bukan berarti berhenti total menjauhi media sosial, karena tindakan memangkas secara tiba-tiba justru dapat memicu stress dan keresahan. Mengurangi waktu penggunaan media sosial adalah alternatif logis, mulai 1 satu jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya (Harsono & Winduwati, 2020).
- c) *Detox* media sosial harus difokuskan pada kemampuan diri dan menghindari kampanye terhadap skala perbandingan. Skala perbandingan yang dimaksud adalah sikap ketika melihat, membaca dan mendengar potret kehidupan orang lain lalu merasakan serangkaian ketertarikan (Suciati et al., 2024).



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

BAB III METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang berfokus pada kemampuan peneliti untuk memadukan banyak referensi, teori, dan literatur pendukung ilmiah lain. Adini et al (2022) menegaskan beberapa tahapan penelitian studi pustaka yakni:

- 1) Menyiapkan perlengkapan/alat,
- 2) Mengalokasikan waktu untuk memahami bahan penelitian,
- 3) Membaca secara mendalam. Berbagai sumber yang dicari oleh peneliti harus memuat unsur-unsur riset ilmiah, biasanya diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, media kompeten, laporan lembaga, dsb.

Mengacu pada tahapan yang disarankan oleh Adini et al (2022) serta dipadukan dengan prosedur ilmiah umum dalam studi pustaka, penjelasan lebih rinci mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Masalah Penelitian: Peneliti mengawali proses dengan merumuskan masalah yang akan dikaji berdasarkan fenomena, wacana, atau isu tertentu yang relevan secara akademik. Rumusan masalah menjadi dasar arah pencarian literatur.

2. Penentuan Tujuan dan Pertanyaan Penelitian: Setelah masalah diidentifikasi, ditetapkan tujuan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui telaah pustaka. Ini menjadi pedoman dalam pemilihan referensi dan kerangka analisis.

3. Pengumpulan Sumber Referensi: Peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, seperti:

- a) Buku akademik,
- b) Jurnal ilmiah nasional dan internasional,
- c) Laporan penelitian atau lembaga resmi,
- d) Artikel dari media massa yang kredibel,
- e) Sumber daring yang terverifikasi, yang mana sumber harus memiliki kualitas akademik dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

4. **Evaluasi dan Seleksi Literatur:** Tidak semua literatur yang dikumpulkan langsung digunakan. Peneliti melakukan evaluasi terhadap validitas, reliabilitas, dan relevansi sumber. Hanya referensi yang memenuhi standar ilmiah yang dilibatkan dalam analisis.
5. **Pembacaan Kritis dan Pencatatan:** Tahap ini melibatkan pembacaan intensif terhadap literatur yang telah terseleksi, disertai pencatatan ide-ide penting, kutipan langsung, maupun ringkasan, serta penandaan keterkaitan antar konsep.
6. **Analisis dan Sintesis:** Peneliti menganalisis isi literatur secara tematik dan kritis untuk:
 - a) Mengidentifikasi pola, teori, atau pendekatan yang digunakan,
 - b) Membandingkan berbagai pandangan,
 - c) Menyusun sintesis baru atau kerangka teoritik yang mendukung analisis dalam penelitian.
7. **Penyusunan Kerangka Pemikiran dan Argumentasi:** Berdasarkan hasil sintesis, peneliti menyusun kerangka konseptual sebagai dasar penjelasan atas permasalahan penelitian. Argumentasi disusun secara logis dan sistematis berdasarkan rujukan yang sahih.
8. **Penarikan Kesimpulan:** Tahapan akhir adalah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian dan dapat mengarah pada implikasi teoritis maupun praktis.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis secara mendalam dan kritis agar referensi yang telah dikumpulkan mampu memenuhi standar ilmiah. Proporsi peneliti bersifat mutlak dan menjadi modal utama dalam metode studi pustaka, sehingga perlu dibangun konstruksi ideal.

Penelitian studi pustaka memiliki kelebihan yang berbanding lurus dengan kualitas penelitian. Oleh karena rendahnya mobilitas peneliti di lapangan, maka melahirkan disiplin dan konsentrasi kuat untuk membangun penelitian berkualitas. Metode studi pustaka memiliki keunggulan dalam efektivitas waktu dan kedalaman telaah teoretis. Meski mobilitas fisik peneliti rendah, metode ini menuntut disiplin tinggi, kemampuan analisis kritis, dan konsentrasi untuk menghasilkan penelitian berkualitas. Peran aktif peneliti dalam



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

membangun argumen dan mengintegrasikan sumber literatur menjadi kunci keberhasilan metode ini.



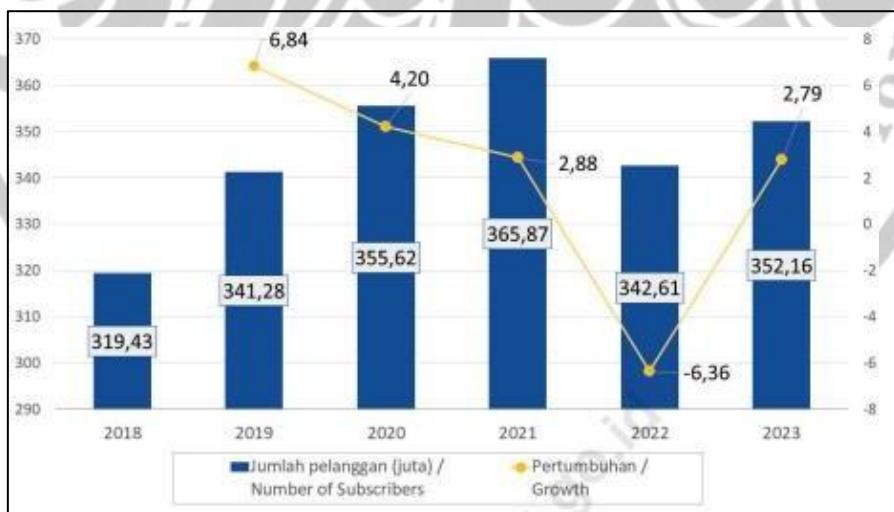
Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Antisipasi Gejala *Fear of Missing Out* Gen-Z

FoMO merupakan tren baru dari ekosistem media sosial yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan muncul. Mengacu pada literatur global, istilah FoMO sendiri dikembangkan dari serapan bahasa inggris dengan arti “takut tertinggal”. Secara umum orang-orang terutama generasi muda saat ini sangat latah dengan istilah FoMO di jagad media sosial dan memungkinkan terjadinya penyebarluasan berlebih.

Berdasarkan kajian statistik *GoodStats* (2023), Indonesia masuk sebagai negara pengguna *smartphone* terlama di dunia dengan rerata 5,7 jam sehari. Trend gandrung *Smartphone* bisa dikatakan satu paket dengan keberadaan media sosial, sehingga gejala FoMO sangat potensial menyerang Gen-Z. secara singkat FoMO akan melemahkan identitas individu hingga mencapai tahap apatis dengan keadaan sekitar. Gen -Z sebagai generasi harapan di 2045 terancam menurun daya saingnya akibat dari gejala FoMO. Perbandingan yang dikaji *GoodStats* adalah antara Indonesia dengan 9 negara lain seperti: Brazil, Saudi Arabia, Singapura, Korea Selatan, Meksiko, Australia, India, Jepang dan Thailand.



Gambar 2. Statistik Pertumbuhan Pengguna Ponsel

Sumber: (BPS, 2024)



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data Statistik Telekomunikasi 2023 dengan lebih spesifik. Disebutkan bahwa kalangan anak-anak di Indonesia di rentang 5 tahun ke atas sudah mengoperasikan ponsel. Fakta yang lebih menarik lagi adalah akses internet mayoritas dilakukan di dalam rumah dan *Smartphone* menjadi alat primadona dibandingkan komputer. Pertumbuhan pengguna ponsel dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan terkecuali di tahun 2022 sebagai masa pemulihan COVID-19.

Tren peningkatan pengguna ponsel rata-rata didukung dengan perkembangan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, data BPS (2024) mempublikasikan beberapa temuan seperti:

- a) Wilayah perkotaan meningkat prosentasenya dari 74,16 persen menjadi 76,30 persen di tahun 2023.
- b) Wilayah pedesaan meningkat prosentasenya dari 55,93 persen menjadi 59,33 persen di tahun 2023.
- c) Pengecualian di tahun 2022 tren pengguna internet dan ponsel menurun sekitar 6,36 persen. Catatan BPS mengklaim penurunan terjadi karena masa pemulihan wabah COVID-19 sehingga masyarakat mulai beraktivitas normal (mengurangi aktivitas *online*).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan pangsa pasar besar bagi penyedia jasa layanan internet, telekomunikasi, *smartphone* dan perkembangannya. Kondisi masyarakat terutama Gen-Z saat ini berada dalam zona nyaman sebagai seorang *user* yang *enjoy* mengoperasikan teknologi. Masyarakat Indonesia berada dalam level sebagai *follower* karena hanya mengikuti arus natural.

FoMO dapat diprediksi akan semakin menonjol di era kemajuan digital selama masyarakat Indonesia masih mempertahankan reputasi sebagai salah satu pengguna terlama *Smartphone*. Banyak negara lain yang mungkin memiliki budaya penggunaan *Smartphone* dan media sosial lebih fanatik dibanding Indonesia, akan tetapi kondisi demikian tidak semestinya dianggap lazim. Dalam hal menyikapi bahaya FoMO, perbandingan paling efektif adalah mengevaluasi ketertinggalan kita dengan disiplin negara lain.



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

Social media detox dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kecemasan dan ketergantungan media sosial. FoMO memerlukan langkah-langkah tepat agar tekanan psikologis bagi diri sendiri dan orang lain berkurang. Kesadaran tinggi perlu dibangun dengan cara membatasi aktivitas *online* dan beralih memperkuat aktivitas di lingkungan nyata.

2. *Rebuilding Fungsi Efektif Media Sosial*

Disiplin negara lain dalam akses penggunaan *Smartphone* dan ketergantungan media sosial adalah rujukan alternatif terbuka jika ingin mengantisipasi dampak FoMO bagi masa depan Indonesia. *American Academy of Ophthalmology* (2024) merilis kampanye gerakan *detox digital* internasional melalui sebuah pengembangan riset. Mereka menemukan beberapa statistik mengejutkan seperti:

- a) Hampir 70% penduduk Amerika mengalami candu perangkat cerdas dan media sosial.
- b) Skala rerata perbandingan 1 dari 10 orang Amerika mengalami depresi karena jam penggunaan internet ringan, sisanya mengalami depresi lebih berat karena 3 kali lipat *screen time*.
- c) 2/3 masyarakat Amerika lebih suka membersihkan kotak masuk *e-mail* membersihkan daripada toilet rumah.
- d) Teknologi adalah sumber stress, setiap orang dan setiap detik responden memeriksa pesan di media sosial layaknya kehausan.
- e) Secara fisik, ada potensi sakit pada leher karena menyangga aktivitas konstan-periodik.

Pasca temuan tersebut, pakar dan peneliti Amerika mulai membangun studi tentang *digital detox*. Membangun kebiasaan baru idealnya dilakukan dalam waktu 20 hari lebih. *Digital detox* dapat dilakukan dengan beberapa langkah pengelolaan sebagaimana ditegaskan hasil studi *American Psychological Association* yakni:

- a) Aktifkan fitur notifikasi sunyi
- b) Singkirkan Smartphone atau ponsel ketika makan
- c) Buat jadwal rutin hidup tanpa teknologi



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

- d) Ciptakan kamar atau ruang khusus pribadi yang terbebas dari zona teknologi internet
- e) Ambil kertas, tuangkan setiap ekspresi dengan natural

Hasil studi *American Psychological Association* sejalan dengan konsep teori Harsono & Winduwati (2020) dengan *statement* bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan proses tidak instan. Ketika proses dipercepat, hasilnya belum tentu efektif. Dalam konteks kecanduan media sosial, yang dibutuhkan adalah manajemen waktu secara bertahap dan melakukan pembiasaan kecil secara berkesinambungan.

Bad habits dalam bermain media sosial melalui komputer dan ponsel hanya dapat dihilangkan dengan metode *detox digital*. Jenis metode detoksifikasi digital salah satunya diperkenalkan oleh kelompok peneliti asal Indonesia, metode tersebut bernama *Dopamine Fasting* (Novianty et al., 2024). Dalam metode DF, fokus utama adalah mengatur jadwal rutin untuk melakukan beberapa kegiatan positif seperti:

- a) Lakukan kegiatan fisik dan perbanyak berinteraksi dengan orang lain sekali pun melalui *meeting online*, misalnya dengan aplikasi Zoom, dan media sosial lain.
- b) Ciptakan perhatian terhadap diri sendiri dan lingkungan terdekat agar muncul motivasi baru untuk menciptakan *Good habits*, misalnya mempelajari skill digital baru, melatih komunikasi massa, dan tujuan- tujuan lagi dalam proyeksi ke depan.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa detoksifikasi digital merupakan konsep untuk mengendalikan teknologi sehingga kemajuan teknologi tidak bisa disalahkan. Media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi idealnya harus difungsikan untuk menopang perkembangan hidup manusia. Media sosial dapat membantu orang-orang saling terhubung, bertukar pengalaman dan informasi, serta menjadi ruang baru untuk melatih *individual digital's skill* terutama bagi Gen-Z.

Social media detox sangat dibutuhkan ketika dibutuhkan ketika aktivitas media sosial Gen-Z hanya berfokus pada membicarakan kehidupan orang lain, berita dan fenomena viral setiap detiknya. Ilustrasinya adalah ketika rajin berkomentar di media sosial mengenai suatu fenomena seputar 1) sosok, 2) pemimpin, 3) bencana, 4) peristiwa dsb. Gen-Z dapat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri, terancam kalah dalam kompetisi dunia kerja.

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Hipotesis ini sejalan dengan penelitian Aji et al (2025) yang menyatakan bahwa Gen-Z memiliki mental digital hanya untuk menikmati keadaan, sehingga sering mencemaskan diri sendiri.



Gambar 3. Cristian Ronaldo Reward

Sumber: *facebook* (2024)

Kanal *Youtube* Cristiano Ronaldo di penghujung Agustus 2024 lalu mendapat respon dari jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Fenomena demikian semakin menguatkan teori ketergantungan media (*media dependency theory*). Jutaan orang terfokus pada sosok mega bintang seperti Ronaldo, meski dari jarak yang begitu jauh. Warganet atau netizen yang di antaranya Gen-Z mungkin saja ada yang bersifat pasif, namun mayoritas aktif sebagai *follower* atau bahkan masuk kategori fanatik terhadap sosok. Setiap video atau konten yang di *upload* ke kanal *Youtube*: UR Cristiano, jutaan reaksi selalu muncul. Fakta ini membuktikan bahwa ekosistem digital media sosial di tingkat global memiliki *high traffic domination* tinggi.

Pola aktivitas media sosial berlebihan berpotensi menciptakan stagnasi perkembangan kualitas Gen-Z di dunia nyata. Alasan tersebut bisa terjadi karena keseharian pecandu media



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

sosial hanya melatih 4 hal yakni: 1) kecepatan *typing* jari jemari, 2) kecepatan menemukan tagar *trending topics* viral serta 3) kecepatan untuk memelihara koneksi internet secara periodik dan terakhir yang paling parah adalah 4) sikap fanatik atau kekaguman *over* akan pencapaian orang lain yang tentunya berorientasi melemahkan jati diri Gen-Z. Solusi dari ekosistem digital yang terlanjur menguat adalah dengan *social media detox*.

Gen-Z merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1996-2010. Mereka lahir dan berkembang di era digital, atau bisa disebut sebagai penduduk asli digital (McKinsey, 2024). Gen-Z kerap memanfaatkan ponsel untuk memperoleh seluruh informasi, pemberitaan, ulasan setiap hari. Bahkan Gen-Z pandai mengatur jam bermedia sosial dengan metode berpindah-pindah dari satu aplikasi maupun situs sehingga membentuk ekosistem kuat (McKinsey, 2024).

Survey *McKinsey Health Institute* (MHI) dengan menanyakan lebih dari 42.000 responden menemukan kebutuhan sosial Gen-Z tidak terpenuhi di sebagian besar wilayah Eropa, bahkan stigma kesehatan mental yang buruk sudah terbentuk. Era kemajuan teknologi berjalan beriringan dengan tingginya persaingan ekonomi, sehingga semakin membatasi keleluasaan Gen-Z. Gen-Z jauh lebih pragmatis dibanding generasi pendahulunya, namun pandangan hidup mereka kurang positif. Mereka meyakini keajaiban dari cerita-cerita komunitas di media sosial, namun di satu sisi mereka takut tertinggal atau mengkhawatirkan masa depan.

Baik pendapat, nilai dan perilaku setiap generasi tidak dapat dikaburkan oleh seluruh pihak. Teori tentang memahami generasi se bisa mungkin diperlukan untuk membentuk cara berpikir yang dinamis.

3. Revolusi Sunyi: Gerakan Beradab Bagi Gen-Z

Kemajuan teknologi dan penggunaan internet di era sekarang hampir didominasi 80% penduduk global. Bidang teknologi semakin maju dan menghasilkan media sosial yang diakses tidak hanya digunakan oleh generasi muda, namun generasi tua sekali pun ikut menggunakan (Dewi et al., 2023).

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang patut dikhawatirkan mengalami fenomena sibuk merespon sesuatu, namun lupa meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri berhubungan dengan konteks SDM yang mana seharusnya seorang individu mampu berlari

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

menguasai teknologi. Media sosial sebenarnya tidak bersifat melemahkan, namun memudahkan. Setiap orang dan setiap detik dapat memanfaatkan media sosial untuk memperoleh *benefit* seperti: 1) keilmuan, 2) *skill* pekerjaan kasar, 3) *skill* pekerjaan digital, 4) promosi produk *online shop*, 5) relasi bisnis dsb.

Di level ASEAN, masyarakat Indonesia pengguna media sosial atau akrab disebut Warganet mendapatkan label skeptis. Pasalnya, sebagian besar Warganet menunjukkan sikap dan pola komunikasi tidak sopan. *Microsoft* sebagaimana dilansir *Indonesiabaik.id* (2021) mengumumkan laporan *Digital Civility Index (DCI)* untuk mengukur tingkat keberadaban digital dunia saat berkomunikasi di media sosial. Indonesia memiliki indeks terendah se-Asia Tenggara.

Tabel 2. ASEAN Digital Civility Index by Microsoft

No	Nama Negara	Skor/Skala	Teknis Studi
1	Indonesia	76/100	Survey diikuti oleh 16.000 responden dari 32 negara. 503 responden berasal dari Indonesia. Materi survey: perilaku, seksual, reputasi dan privasi.
2	Vietnam	72/100	
3	Thailand	69/100	
4	Filipina	66/100	
5	Malaysia	63/100	
6	Singapura	58/100	
			*catatan: semakin tinggi skor, artinya semakin rendah tingkat kesopanan

Sumber: *Indonesiabaik.id* (2021)

Revolusi sunyi dapat dimaknai sebagai gerakan beradab yang besar guna mengimbangi besarnya ekosistem media sosial. Substansi dari revolusi sunyi dalam ekosistem media sosial sebenarnya terletak pada keputusan setiap pengguna (netizen, warganet). Keputusan untuk menunjukkan perilaku positif maupun negatif di dunia maya masuk dalam ranah privasi, dan membutuhkan proses untuk melakukan perubahan besar (merevolusi).

Sebagian besar masyarakat Indonesia terutama Gen-Z terlalu cepat mengambil keputusan, terutama melontarkan opini di media sosial sebelum adanya *crosscheck* atau riset kecil.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Terdapat pola sulit percaya yang ditunjukkan masyarakat dengan pejabat publik dan penegak hukum, atau merasa keadilan sulit diwujudkan pada kaum menengah ke bawah (Wijoyo, 2023).

Gen-Z menjadi bagian kelompok netizen yang kerap menunjukkan pola perilaku mudah tersulit emosi, tidak berpikir rasional di media sosial. Tindakan yang dikedepankan adalah pengaruh situasional dari orang banyak sehingga mereka berujung ikut-ikutan. Menghujat, menyudutkan, dan menghakimi secara verbal kerap dilakukan secara kolektif dan terjadi saling *support* antar netizen yang satu pemikiran. Terhadap netizen yang tidak satu pemikiran, umpan balik atau respon melalui kolom komentar biasanya bertahan selama beberapa hari (Rochman, 2021).

Krisis membaca informasi kerap terjadi pada budaya media sosial Gen-Z, terutama ketika sebagian orang berusaha memaksakan pendapat kepada orang lain. Budaya selektif terhadap informasi juga menjadi tantangan lain, karena biasanya hanya dengan membaca judul bisa mengecoh di luar fakta. Artinya literasi digital sebagian besar masyarakat sangat rendah (Prasetya et al., 2022).

Beberapa penelitian di atas semakin menandai bahwa *social media detox* sangat penting untuk dikaji, dikembangkan dan diterapkan. Konsep *social media detox* sangat relevan untuk menjawab krisis peradaban digital di Indonesia. Konsep *social media detox* merujuk pada upaya untuk mengurangi, bukan menghentikan total aktivitas media sosial. Kontrol Gen-Z atas dirinya sendiri perlu diarahkan pada ritme positif, terutama ketika menimbulkan dampak negatif seperti stress dan penurunan produktifitas hidup hingga gejala mencemaskan masa depan.

Social media detox adalah jalan keluar konkrit ketika ekosistem digital Gen-Z di Indonesia dicap sebagai budaya buruk oleh negara lain. Sebelum memicu lebih banyak Gen-Z terbawa arus budaya digital non- produktif di Indonesia, maka diperlukan beberapa tindakan preventif seperti:

1. Dukungan pemerintah melalui strategi dan regulasi edukatif, misalnya mempromosikan etika digital yang baik dengan lebih intens.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

2. Pengawasan konten dengan pembatasan akses media sosial agar produktifitas Gen-Z tidak lemah.
3. Kolaborasi Internasional dengan negara disiplin untuk menularkan budaya digital positif dan lepas dari kecanduan media sosial.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

BAB V PENUTUP (SIMPULAN & REKOMENDASI)

Social media detox merupakan konsep umum yang banyak dikaji internasional terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti lahirnya media sosial telah menciptakan ekosistem dan budaya baru seperti pola komunikasi dan interaksi Gen-Z. Kecenderungan masyarakat terutama Gen-Z dalam melakukan aktivitas di depan media sosial tidak selamanya berdampak positif. Penemuan dampak negatif seperti kekhawatiran berlebihan, takut tertinggal, produktifitas menurun, *cyberbullying*, sikap malas, menunda pekerjaan dan lain sebagainya adalah serangkaian bukti bahwa media sosial mempengaruhi tindakan manusia. Tingginya pengaruh media sosial secara teori terjadi karena para pengguna (*user*) gagal mengendalikan diri, sehingga efektifitas media sosial sebagai jejaring komunikasi gagal diciptakan. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan *social media detox* sebagai visi yang efektif dikelola bersama terutama akan jauh lebih efektif melalui dukungan pemerintah. dalam rangka mengupayakan keseimbangan hidup masyarakat, *social media detox* adalah gerakan revolusi sunyi karena besarnya pengaruh ekosistem media sosial membutuhkan langkah-langkah besar supaya mengimbangi.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

DAFTAR PUSTAKA

- 5 billion social media users. (2024, January 31). DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-5-billion-social-media-users>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Aji, W. T., Rosiana, M., Musida, A. A., & Wahyuni, F. (2025). Hidup Demi Eksistensi dan Validasi di Tengah Tren FOMO Sosial Media. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2174>
- Andrean W Finaka. (2021). *Benarkah Netizen Indonesia Paling Tak Sopan se- Asia? / Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/benarkah- netizen-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia>
- Ariq, N. (2024). Dopamine Detox sebagai Praktik Zuhud Era Modern dalam Upaya Mengatasi Dampak Negatif Teknologi. *Jurnal Riset Agama*, 4(3), 210–220.
- Astuti, S. W., & Subandiah, D. S. (2020). Detox Media Digital (Sikap Milenial Terhadap Detox Media Digital). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 6(2). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/4071>
- BPS Indonesia. (2024, Agustus). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023—Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html>
- Data, G. (2023, July 2). *Indonesia Jadi Negara Pemakai Handphone Terlama di Dunia 2023*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia- jadi-negara-pemakai-handphone-terlama-di-dunia-2023-lUeoC>
- Dewan Pers Indonesia. (2023, December 26). *Membangun Ekosistem Media Di Era Digital*. https://dewapers.or.id/assets/ebook/jurnal/2312291456_5_Jurnal_Pers_v01_26_terbit_Desember_2023.pdf
- Dewi, S. K., Handayani, R. D. P., & Saputro, D. D. A. (2023). Implementasi model EOPACT (Education, Observing, Positif ACTion) terhadap cyberbullying di era digital. *SERUNAI*, 3(2), 80–87.
- Digital Detox—American Academy of Ophthalmology. (2024). <https://www.aoa.org/membership/physician-wellness/digital-detox>

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

-
- Fauziawati, W. (2015). Upaya mereduksi kebiasaan bermain game online melalui teknik diskusi kelompok. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(2), 115–123.
- Harsono, L., & Winduwati, S. (2020). Detox Instagram pada self-esteem pengguna. *Koneksi*, 4(1), 83–89.
- Ismi, A., Nurbayani, S., & Sartika, R. (2022). Detox Sosial Media Sebagai Upaya Mengatasi Social Media Addiction dan FoMO (Fear of Missing Out). *Jurnal Sosialisasi*, 9(3), 92–101.
- Jung, J. (2017). Media Dependency Theory. In P. Rössler, C. A. Hoffner, & L. Zoonen (Eds.), *The International Encyclopedia of Media Effects* (1st ed., pp. 1–10). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0063>
- Kristeen Cherney. (2020, August 6). *Social Media Addiction: What It Is and What to Do About It?* Healthline. <https://www.healthline.com/health/social-media-addiction>
- McKinsey. (2024). Apa itu Gen Z? / McKinsey. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-gen-z>
- Mim, F. N., Islam, M. A., & Kumar, G. (2018). Impact of the use of social media on students' academic performance and behavior change. *Age*, 18(20), 150.
- MotleyRice. (2024, April 22). *Statistik Kecanduan Media Sosial / Statistik Penggunaan & Bahayanya* / Motley Rice. <https://www.motleyrice.com/social-media-lawsuits/addiction-statistics>
- Nabila, H. Y. (2022, November 5). *Siapkah Generasi Indonesia 2045 Hadapi Bonus Demografi?* ITS News. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/siapkah-generasi-indonesia-2045-hadapi-bonus-demografi/>
- Novianty, R., Elvyra, R., Amtarina, R., Putrianti, A., & Seteven, S. (2024). Peningkatan Produktivitas Pemuda Melalui Dopamine Detox Bersama Barisan Muda Riau. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 42–56.
- Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola perilaku bermedia sosial netizen Indonesia menyikapi pemberitaan viral di media sosial. *Journal of Digital Communication and Design (JDCODE)*, 1(1), 1–12.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Rincy, V. M., & Panchanatham, N. (2014). Work life balance: A short review of the theoretical and contemporary concepts. *Continental Journal of Social Sciences*, 7(1), 1–24.

Rochman, A. N. (2021). Perilaku netizen dalam beretika di sosial media. *Pendidikan*. <http://repository.untag-sby.ac.id/9036/>

Seekis, V., Mulgrew, K. E., Prichard, I., Manning, H., Wood, I., & Stevenson, C. (2025). To detox or not to detox? The impact of different approaches to social media detox strategies on body image and wellbeing. *Body Image*, 52, 101849. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101849>

Suciati, P., Maulidiyanti, M., Nurul Karimah, F., & Wan Zainodin, W. H. (2024). The impact of using social media: Exploring the level of insecurity of active and non-active Instagram users in Indonesia. *E-Journal of Media and Society (eJOMS)*, 7(1), 82–96.

Utoro, D. Y. S., Susetyo, S., & Ariesta, R. (2020). Kekerasan Verbal dalam Media Sosial Facebook. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing*, 3(2), 150–166.

Wijoyo, D. O. (2023). Analisis Media Sosial Mengenai Isu Indonesia Sebagai Negara Paling Tidak Sopan di Asia Tenggara. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 1–6.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

**MEMBANGUN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG ADAPTIF MENYONGSONG
INDONESIA EMAS 2045**

**Oleh: Farco Siswiyanto Raharjo, Paper
Dosen Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

Email: farcoraharjo@gmail.com

Abstrak.

Beragam kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan berjalan secara dinamis. Beragam program dikenalkan salah satunya adalah wajib belajar. Era orde baru memulai wajib belajar selama 6 tahun, era reformasi bertambah secara bertahap menjadi wajib belajar selama 9 tahun. Saat ini wajib belajar diwajibkan menjadi 12 tahun dengan kebijakan yang menjadi konsentrasi melibatkan peran pada tingkat pemerintah daerah. Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang memiliki disain dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Hal ini bukan hanya tentang penyesuaian terhadap konten pembelajaran, namun juga terkait dengan metode pengajaran yang fleksibel. Hal ini memungkinkan pendidik atau guru menyesuaikan teknik pengajaran sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan dari peserta didik. Misalnya diera digital materi pembelajaran mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Indonesia Emas.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Bab I Pendahuluan.

Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan didunia, karena melalui pendidikan, manusia dapat mengubah dunia (Nelson Mandela). Kata ini merupakan ungkapan yang memiliki makna tersirat bahwa pendidikan memiliki peluang yang penting bagi kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sebagai penentu daya saing secara global.

Republik Indonesia memiliki sejarah penjajahan secara kolonialisme dan imperialisme. Penjajahan tersebut dilakukan oleh berbagai negara mulai dari Negara Portugal, Belanda dan Jepang. Peristiwa penjajahan tersebut diantaranya adalah membatasi akses pendidikan bagi masyarakat. Hanya kalangan tertentu yang dapat memperoleh akses pendidikan pada era penjajahan.

Mereka yang memiliki akses pendidikan adalah anak bangsawan atau keturunan priyayi yang di pandang sebagai kalangan dengan strata sosial yang tinggi. Keadaan tersebut mendorong beberapa kalangan yang memiliki akses pendidikan membentuk suatu gerakan yang kemudian berkembang diberbagai daerah. Gerakan tersebut diantaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Perhipunan Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut disebut dengan gerakan nasional. Tujuan dari gerakan nasional tersebut adalah melepaskan diri dari penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia melakukan ikrar kemerdekaan melalui proklamasi dibacakan oleh Proklamator yakni Bung Karno dan didampingi Mohammad Hatta, yang kemudian kedua tokoh ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama.

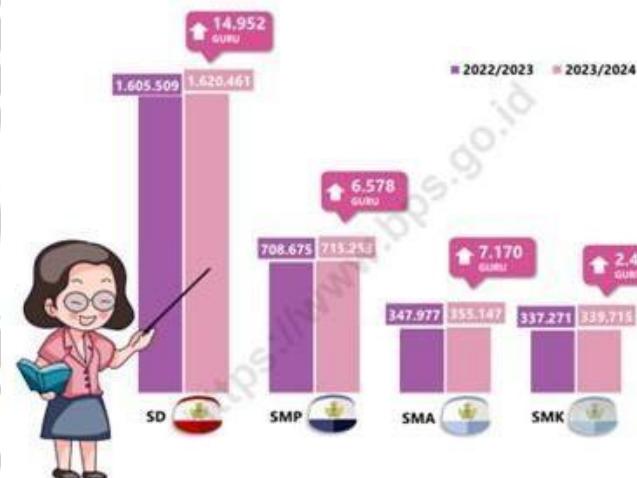
Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka secara absolut, maka tata kelola negara mulai dilakukan. Salah satunya dibidang pendidikan. Setiap pemerintahan di setiap era nya yaitu era orde lama, masa orde baru, serta saat reformasi, bidang pendidikan secara khusus memiliki kementerian. Pendidikan menjadi bidang prioritas bagi negara Indonesia, hal ini dapat kita ketahui bahwa alokasi penganggaran keuangan negara sebesar 20% dari jumlah pendapatan negara digunakan untuk bidang pendidikan. Situasi ini sebagai wujud amanat regulasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 31, selanjutnya secara teknis diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum pada pasal 112. Secara tekstual dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Beragam kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan berjalan secara dinamis. Beragam program dikenalkan salah satunya adalah wajib belajar. Era orde baru memulai wajib belajar selama 6 tahun, era reformasi bertambah secara bertahap menjadi wajib belajar selama 9 tahun. Saat ini wajib belajar diwajibkan menjadi 12 tahun dengan kebijakan yang menjadi konsentrasi melibatkan peran pada tingkat pemerintah daerah.

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Dinamika pemerintah pada setiap daerah memiliki kemampuan secara beragam diantaranya merupakan akses terhadap fasilitas pendidikan diberbagai daerah. setiap dalam segi fasilitas pendidikan. Terutama bagi daerah yang jauh dari akses infrastruktur serta wilayah geografis yang sulit dijangkau. Distribusi guru sebagai pendidik menjadi perhatian khusus bagi pengembangan kebijakan pendidikan. Guru dalam menerapkan pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemberdayaan siswa menjadi orientasi secara berkelanjutan.

Peran guru tidak pada sebatas melakukan aktifitas mengajar, namun memiliki peran mendidik, membimbing dan melakukan evaluasi pada setiap peserta didik di setiap tingkat jenjang pendidikan (Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen). Berikut ini adalah jumlah guru di Indonesia :



Sumber Data : Statistik Pendidikan tahun 2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Bidang pendidikan dan pengajaran saat ini sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi digital secara global. Namun ketersediaan sarana teknologi masih terjadi kesenjangan bagi beberapa daerah di Indonesia. Bahkan masih terdapat daerah yang mengalami *blank signal internet*. Mengingat di sisi lain pemerintah memberikan ruang melalui kebijakan pembelajaran berbasis e-learning yang memungkinkan pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja.

Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pengajaran di Negara Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademis saja, namun yang lebih penting adalah perlu



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

pengembangan pendidikan karakter dengan mengedepankan kearifan lokal. Siswa pada generasi Z dan generasi alfa mengalami krisis karakter. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus pelaporan polisi oleh orang tua murid kepada guru yang memberikan sanksi siswa. Laporan tersebut diantaranya adalah menggunakan pasal tentang penganiayaan. Hal ini menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Selanjutnya, terjadi kontroversi kasus pelaporan polisi yang ditujukan kepada guru. Pelaporan tersebut diantaranya adalah pelaporan kepada guru supriyani pada tahun 2024 pada tahun 2024 karena menegur siswa. Kemudian seorang guru SD Negeri Bantaeng bernama maya dikasuskan karena melerai siswa yang berkelahi. (Sumber Berita : Harian Kompas Edisi 30 Oktober 2024 dengan tajuk “Polemik Kriminalisasi Guru dan Pendidik”).

Melalui uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk *paper*. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kemudian memberikan manfaat melalui analisa terkait kebijakan pendidikan yang lebih adaptif. Hal ini menjadi langkah untuk menyongsong Indonesia Emas era 2045.

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Bab II Tinjauan Pustaka.

a. Teori Kebijakan Publik.

Kebijakan umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani kondisi tertentu. Proses pengambilan keputusan ini melewati beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Rumusan kebijakan publik yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan bahwa istilah kebijakan sering digunakan dalam konteks kegiatan pemerintah serta perilaku negara secara umum. Kebijakan-kebijakan ini kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

James E. Anderson (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabatnya.” Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh individu atau kelompok, dalam hal ini pemerintah, dengan tujuan tertentu untuk mengatasi masalah atau isu tertentu.

Thomas R. Dye (2013:12) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah atau keputusan untuk tidak bertindak, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari para pelaksana tentang langkah-langkah yang harus diambil. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran agar dapat meminimalkan distorsi dalam implementasi. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak tercermin dengan jelas atau bahkan tidak dipahami oleh kelompok sasaran, hal ini dapat menyebabkan kebingungan informasi (Sugiyono, 2005: 49).

Syafiee (2006: 104) juga menekankan pentingnya perbedaan antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijaksanaan adalah penerapan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan konteks dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai respons terhadap masalah yang ada, yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah terjadinya keburukan. Di sisi lain, kebijakan juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan, dengan cara yang terbaik dan terarah.

Salah satu model kebijakan yang dikenal adalah Model Sistem. Model ini berupaya menggambarkan kebijakan publik sebagai hasil (output) dari suatu sistem politik. Dalam konsep sistem, terdapat serangkaian institusi dalam masyarakat beserta aktivitasnya yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mentransformasikan berbagai tuntutan menjadi keputusan yang bersifat otoritatif. Proses transformasi ini memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, konsep sistem mencakup berbagai unsur yang saling berinteraksi, yang memungkinkan untuk memberikan respons terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Semua ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi keberlanjutan sistem itu sendiri.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Berdasarkan semua definisi diatas maka secara umum Kebijakan publik merupakan proses keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yang memiliki otoritas publik untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan choice/pilihan yang ada dan dibuat oleh pemerintah sebagai otoritas publik mengenai apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum.

b. Teori Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, generasi sekarang dapat menjadi teladan bagi generasi sebelumnya. Hingga saat ini, batasan untuk menjelaskan makna pendidikan secara menyeluruh belum dapat ditentukan, mengingat kompleksitasnya yang berkaitan dengan manusia sebagai sasaran utamanya. Kompleksitas ini sering kali didefinisikan sebagai ilmu pendidikan, yang merupakan pengembangan dari pendidikan itu sendiri. Ilmu pendidikan lebih menekankan pada teori-teori pendidikan yang berbasis pemikiran ilmiah, sehingga pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dalam praktik maupun teori. Dalam perjalanan hidup manusia, keduanya saling berkolaborasi.

Menurut Ki Hajar Dewantara (2004), pendidikan adalah panduan dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Maksudnya, pendidikan mengarahkan segala potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berkembang sebagai individu dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal. Berdasarkan definisi Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan suatu upaya untuk membimbing anak sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka, agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan juga memiliki sifat holistik, mencakup aspek intelektual, moral, dan sosial.

Berdasarkan definisi tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara diatas, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, melainkan usaha membimbing peserta didik berdasarkan pada potensi yang dimiliki untuk menjadi manusia yang memiliki dampak dan berguna bagi



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

masyarakat. Selain itu, pendidikan juga bersifat holistik, meliputi aspek intelektual, moral, dan sosial.

Darmaningtyas (2021) melihat Pendidikan sebagai usaha sadar untuk menumbuhkan potensi peserta didik melalui proses bimbingan, pengajaran, serta pelatihan agar mereka mampu hidup mandiri dan berkontribusi di masyarakat. Melalui hal tersebut, output pendidikan adalah pada aspek sensitifitas dan kepekaan sosial. Selanjutnya melalui kepekaan sosial tersebut bedampak pada masyarakat.

Zamroni (2020) mengatakan bahwa Pendidikan merupakan proses pembudayaan yang membentuk karakter dan kepribadian anak bangsa secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga non-formal dan informal.

Definisi pendidikan yang lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Hal ini mencakup penguatan aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, pembentukan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk individu itu sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dengan demikian, definisi ini menegaskan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang dirancang secara sistematis dan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh melalui pengembangan aspek intelektual, spiritual, moral, dan keterampilan.

c. Teori Negara.

Kata "negara" memiliki dua pengertian yang penting. Pertama, negara dapat diartikan sebagai masyarakat atau wilayah yang membentuk suatu kesatuan politik. Dalam konteks ini, negara-negara seperti India, Korea Selatan, atau Brazilia termasuk dalam definisi tersebut. Kedua, negara merupakan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politik ini, yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menguasai wilayah tersebut (Suseno, 1990: 170). Dalam ilmu politik, istilah negara merujuk pada suatu entitas (agen) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat dan menghasilkan fenomena-fenomena kekuasaan di dalamnya (Suseno, 1990: 38).



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Menurut Krasner (1983:10), negara terdiri dari berbagai peran dan institusi yang memiliki motivasi dan tujuan spesifik yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Eric Nordlinger, dalam bukunya yang berjudul *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11), memandang negara sebagai sekumpulan individu yang menduduki jabatan yang memberikan mereka kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh segmen masyarakat.

Kekuasaan merupakan isu sentral dalam konteks negara, karena negara adalah institusi politik terbesar yang memiliki otoritas. Berdasarkan pandangan Max Weber, kekuasaan yang ada dalam suatu negara mencakup penggunaan paksaan yang sah di wilayah tertentu. Oleh karena itu, ketika para ilmuwan politik mempelajari negara, otomatis mereka juga membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekuasaan di dalamnya, seperti asal-usul kekuasaan, proses persaingan dan pematangannya, dinamika, serta cara pengalokasian dan distribusinya.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Bab III Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam buku Anggito dan Setiawan (2018:7), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di dalam konteks alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, menggunakan berbagai metode yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode yang diterapkan melalui studi literatur.

Studi literatur, atau yang sering disebut sebagai studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah sumber- sumber tertulis. Ini mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber terpercaya lainnya, baik dalam bentuk tulisan maupun digital, yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam model interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen ini harus selalu ada dalam analisis data kualitatif, karena hubungan antara ketiganya harus terus dibandingkan untuk menentukan arah dan isi kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Bab IV Pembahasan.

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar mencakup enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berlangsung selama tiga tahun. Untuk pendidikan tinggi, tersedia berbagai institusi seperti sekolah tinggi, politeknik, institut, dan universitas. Seluruh sistem pendidikan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kurikulum adaptif merupakan pendekatan yang dirancang untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi yang terus berkembang. Kurikulum ini tidak hanya melibatkan penyesuaian pada konten pelajaran, tetapi juga pendekatan pengajaran yang fleksibel, memungkinkan para guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Di era digital seperti sekarang, penting bagi materi pelajaran untuk terus diperbarui dengan informasi terbaru serta memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar.

Kurikulum adaptif juga harus bersifat inklusif, memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima dukungan dan sumber daya yang mereka perlukan untuk belajar secara efektif. Penerapan kurikulum ini akan menjadi lebih kuat jika diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, sehingga semua satuan kerja di bidang pendidikan dapat melaksanakan secara menyeluruh.

a. Kebijakan Peningkatan Literasi.

Kemampuan literasi merupakan elemen krusial dalam kebijakan pendidikan yang adaptif. Melalui membaca, pelajar dapat mengembangkan secara signifikan kemampuan kognitif dan psikomotoriknya. Namun, minat membaca masih menjadi tantangan utama dalam hal literasi.

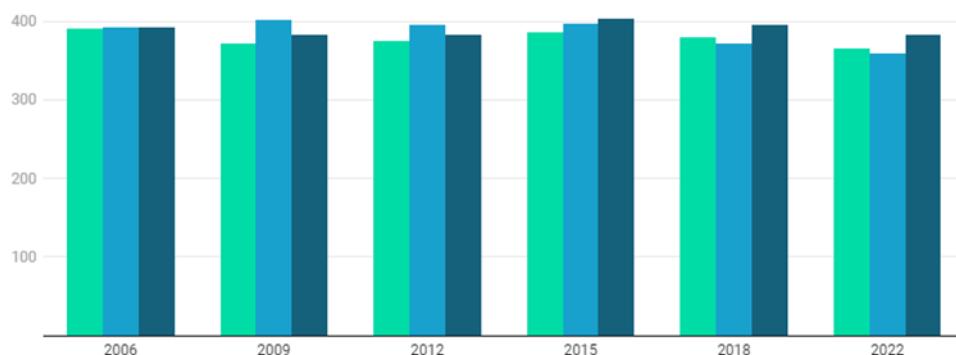
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, persentase anak yang dibacakan buku cerita atau dongeng, serta belajar dan membaca buku anak usia dini bersama orang tua atau wali sangat rendah, masing-masing hanya mencapai sekitar 17,21% dan 11,12%. Padahal, kedua aktivitas ini sangat penting untuk meningkatkan literasi anak di usia dini.

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Pada sisi lain, pada tahun 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat sebagai yang terendah dibandingkan dengan skor PISA di tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2000, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) secara konsisten melaksanakan penilaian mengenai kualitas pendidikan di berbagai negara melalui PISA, yang bertujuan untuk mengevaluasi prestasi siswa berusia 15 tahun setiap tiga tahun sekali..

Skor PISA di Indonesia

■ Matematika ■ Membaca ■ Sains



Source: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) • [Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

Gambar 4.1. Skor Program for International Student Assessment (PISA) - , Sumber Data : Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Di Indonesia, kebiasaan membaca di kalangan pelajar masih sangat minim, yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat literasi. Padahal, literasi adalah fondasi penting dalam memperoleh pengetahuan yang berarti dan kunci kesuksesan di masa depan.

Saat ini, pemahaman tentang literasi telah berkembang jauh melampaui sekadar kemampuan membaca dan menulis. Seseorang yang memiliki kesadaran literasi yang baik mampu memahami informasi yang kompleks, berpikir kritis, peka terhadap risiko, serta dapat menerapkan pengetahuan secara praktis dan strategis dalam kehidupan sehari-hari.

b. Dinamika Kebijakan Pergantian Kurikulum

Kurikulum menjadi pondasi dalam menciptakan luaran hasil pendidikan. Seringkali terjadi pergantian menteri akan mengubah pula kurikulum yang ada. Perjalanan waktu di Indonesia pernah menggunakan kurikulum pendidikan 1994, kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Kompetensi (KBK), Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran) 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka.



Gambar 4.2. Kurikulum di Indonesia Sumber : ketik.co.id

Dinamika yang terjadi pada masa ke masa diperlukan untuk menghasilkan kualitas lulusan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Akan tertapi jangan melupakan bahwa pengembangan kompetensi akademik dan skill perlu diimbangi dengan luaran pencapaian pengembangan budi pekerti.

Setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda. Pada generasi X akan berbeda dengan generasi Y. Kemudian generasi Millenial akan berbeda dengan generasi alpha. Perbedaan generasi tersebut berimplikasi pada perubahan kepekaan sosial. Maka kurikulum yang menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan, perlu mengakomodir pembangunan terhadap kepekaan sosial. Sehingga generasi tersebut tidak bersifat individualistik.

Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika dan evolusi pendidikan yang harus dihadapi seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan global yang semakin kompleks. Pembaruan kurikulum yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk menjaga relevansi serta kualitas pendidikan. Untuk menghadapi tantangan di masa depan, pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi semua pemangku kepentingan, serta pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

c. Kebijakan Pendidikan Adaptif perkembangan Teknologi.

Teknologi memiliki sentralitas penting dalam mewujudkan kurikulum yang adaptif. Model pembelajaran konvensional telah bertransformasi menjadi pembelajaran modern. Hal ini ditandai dengan pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Maka yang tidak mengikuti perkembangan tersebut otomatis akan tertinggal.

Keadaan ini mengharuskan negara memiliki peran strategis dan peran taktis. Mengingat Indonesia sebagai negara besar, memiliki multidimensi akses yang variatif. Kondisi geografis menjadi tantangan dalam memastikan ketersediaan perangkat pembelajaran digital. Terutama bagi daerah kategori tertinggal dan terluar.

Platform pembelajaran digital, seperti sistem manajemen pembelajaran (LMS) dan alat kolaborasi online, memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Siswa kini dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja, belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta menerima umpan balik secara langsung.

Teknologi juga mendorong terciptanya pengalaman pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, melalui penggunaan simulasi, video pembelajaran, dan berbagai metode edukatif lainnya. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang diperlukan tersedia dan terjangkau bagi semua sekolah, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Namun, tantangan seperti akses transportasi, listrik, dan koneksi internet yang buruk menciptakan kesulitan dalam meratakan kualitas pendidikan. Selain itu, Indonesia seringkali mengalami perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang kerap berubah seiring dengan pergantian kabinet Presiden. Hal ini mengakibatkan daerah-daerah terpencil kesulitan untuk berkembang dan beradaptasi dengan kurikulum pendidikan yang baru (Tempo, 2023; Abduh et al. , 2022).

Dengan meningkatnya penggunaan pembelajaran berbasis teknologi, menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis yang memastikan akses terhadap listrik, internet, dan perangkat digital bagi para pelajar yang berada di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Bab V Penutup

Kualitas pembelajaran merupakan ukuran seberapa berhasil proses pendidikan di dalam kelas, yang dipengaruhi oleh banyak elemen. Elemen utama termasuk adanya tujuan belajar yang spesifik, fasilitas dan perlengkapan yang cukup, serta suasana belajar yang mendukung. Hubungan antara pengajar dan peserta didik, serta metode pengajaran yang digunakan, juga sangat menentukan. Untuk memperbaiki kualitas, sangat penting bagi pengajar untuk merencanakan proses pembelajaran yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Kebijakan pendidikan memegang peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kebijakan yang dirumuskan dengan tepat bisa menjadi kerangka strategis yang memfasilitasi terciptanya suasana belajar yang efisien, terbuka bagi semua, dan berfokus pada tuntutan masa depan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki kemampuan untuk menjamin distribusi akses pendidikan yang merata, meningkatkan kemampuan para pengajar, memperbarui kurikulum, serta memasukkan teknologi untuk mendukung metode pembelajaran yang lebih kreatif.

Namun, keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari tantangan dalam pelaksanaan, seperti variasi keadaan setempat, keterbatasan dana, dan penolakan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan efek positif yang berkelanjutan.

Dengan penerapan kebijakan kurikulum yang dapat diubah sesuai kebutuhan, Indonesia dapat menuju sistem pendidikan yang lebih luwes dan sesuai zaman. Pelajar akan semakin siap menghadapi tantangan global melalui penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi sepanjang hidup mereka.

Kurikulum yang fleksibel juga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung, memungkinkan setiap pelajar berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik,



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

orang tua, dan masyarakat, pendidikan di Indonesia berpotensi mengalami transformasi besar, menghasilkan generasi yang percaya diri dan terampil dalam menghadapi masa depan.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Daftar Pustaka

- Adolphus, Lawton dan Dye. (2013) The Effect Of Breakfast Behavior And Academik Performance In Children And Adolescent. *Human Neuroscience*.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking* (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. Anoegrajekti
- Badan Pusat Statistik. (2024). Data Statistik Pendidikan Indonesia Volume 13 tahun 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik.
- Darmaningtyas. (2021). *Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Kompas.
- Dewantara, Ki Hajar. (2004). *Pendidikan: Pemikiran, Konsep, dan Teladan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kencana, Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta.
- Krasner, Stephen (Ed.). 1983 International Regimes. Cornell University Press. New York
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Triyanto, Suseno Widodo. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan. Perekonomian Indonesia. Jakarta: KANISIUS.
- Zamroni. (2020). *Pendidikan Karakter di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Website : <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/02/20/perkembangan-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> diakses pada 3 April 2025 pukul 17.31 WIB
- <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/perkembangan-kurikulum-di-indonesia-dari-masa-ke-masa> diakses pada 3 april 2015 pukul 19.12 WIB



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

https://setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1 diakses pada 3 April 2025 pukul 20.03 WIB





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Optimalisasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan SDM Unggul di Daerah 3T Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh: Rega Firmansyah, Essay
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

PENDAHULUAN

Sesuai dengan sasaran utama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada visi ke - 4 dikatakan bahwa daya saing sumber daya manusia meningkat, hal ini dimaknai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata melalui pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi, kreativitas serta kesehatan dan terpenting melalui peningkatan pendidikan. Akan tetapi, terdapat ketimpangan atau lebih tepatnya kesenjangan pendidikan akibat dari kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan tersebut dapat terlihat dari tingkat kemiskinan yang tinggi yang berakibat selain pengangguran yang meningkat juga mengakibatkan ketertinggalan dalam bidang pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas adalah pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, yang nantinya berperan penting dalam mendorong pembangunan di daerahdaerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan pendidikan yang baik, individu dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja serta berkontribusi terhadap kemajuan daerahnya. Meningkatnya mutu sumber daya manusia (SDM) di wilayah 3T akan membawa perubahan signifikan, seperti peningkatan kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih baik, harapannya dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas juga bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin lokal yang siap membawa perubahan positif bagi lingkungannya, sehingga kesenjangan antara daerah maju dan 3T dapat berkurang. Lebih jauh lagi, pendidikan yang berbasis inovasi dan kewirausahaan mendorong masyarakat untuk menciptakan solusi kreatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan membangun ekonomi yang berakar pada kearifan lokal.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Dengan kata lain, pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi faktor krusial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah 3T, menuju visi Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas persoalan ini yang kemudian dihubungkan mengenai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)

ISI

Pendidikan sebagai Kunci Pembangunan SDM Unggul di Daerah 3T Pendidikan yang berkualitas merupakan faktor utama dalam membentuk SDM yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan memungkinkan individu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja serta mendorong inovasi dan kreativitas yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Tanpa akses pendidikan yang memadai, daerah 3T akan semakin tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.

Kebijakan Pendidikan yang Telah Diterapkan di Daerah 3T

Beberapa kebijakan pendidikan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T antara lain:

- **BOS Afirmasi dan BOS Kinerja:** Kemendikbudristek mempercepat penyaluran serta meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan BOS yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kemajuan di suatu wilayah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bantuan dana operasional bagi sekolah-sekolah di daerah 3T guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
- **Program Kampus Mengajar :** Para mahasiswa yang tergabung dalam program KM akan diminta menjadi tenaga pendidik dalam membantu para guru, selain para mahasiswa mencari pengalaman hal tersebut sangat berdampak pada pembangunan serta pemerataan pendidikan di Indonesia.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

- **Program Pengabdian Masyarakat:** Mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan terkhusus pada bidang pendidikan di daerah 3T melalui inovasi sosial sama halnya seperti kampus mengajar.

Membangun Kesadaran Generasi Z sebagai Agen Perubahan:

- Mengedukasi generasi Z tentang peran mereka dalam mendukung pendidikan inklusif dimana pentingnya pendidikan tanpa ada pembatas dari daerah, suku, umur dan sebagainya serta mendukung sebuah pendidikan progresif atau pembelajaran yang menekankan pada aspek keaktifan siswa.
- Melibatkan mereka dalam program seperti Kampus Mengajar, Mahasiswa Mengabdi, dan Relawan Pendidikan Digital untuk mengaplikasikan keterampilan mereka secara langsung.
- Memfasilitasi forum diskusi dan pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa dan pemuda untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sosial dalam pendidikan.

Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Generasi Z Di Masa Depan :

Semakin maju pendidikan di suatu negara, maka hal tersebut akan berdampak luas di berbagai sektor. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya memperbaiki sistem yang dibuat oleh pemerintah yang kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Memperbaiki bagian mana? Pemerintah hanya menganggap sebuah kebijakan hanya sebuah tulisan hitam putih di atas kertas putih tanpa ada kesungguhan dalam menjalankan, maksudnya apabila terdapat kekurangan tidak ditanggapi dengan serius. Bila kita melihat di China, mereka me-research untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi sehingga dapat menemukan sebuah solusi. Jadi, kita sebagai Gen-Z menjadi kunci keberhasilan kebijakan pemerintah yang mengarah pada kemajuan yang diawali dari sektor pendidikan.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

PERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN SDM UNGGUL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Raka Kurniawan, Essay
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Indonesia akan memasuki fase penting dalam sejarah bangsa pada tahun 2045, tepat di usia kemerdekaan yang ke-100. Momentum ini telah ditetapkan sebagai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan ekonomi terkuat di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci yang menentukan. Pendidikan sebagai sektor fundamental dalam pembangunan manusia memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global (Kemendikbudristek, 2022).

Generasi Z, yang saat ini menempuh pendidikan di bangku SMA dan kuliah, akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Generasi yang tumbuh di era digital, memiliki karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dengan akses luas ke informasi, keterampilan digital yang mumpuni, dan pola pikir yang lebih terbuka. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang rumit seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial dan hambatan teknologi yang semakin besar.

Kebijakan Pendidikan adalah alat yang penting untuk desain arah dan kualitas pendidikan nasional. Melalui kebijakan Pendidikan yang tepat, pendidikan dapat diarahkan untuk menghasilkan SDM yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, akan tetapi juga memiliki keterampilan, karakter, dan daya adaptasi yang tinggi. Kebijakan pendidikan sendiri menjadi sebuah instrumen yang penting dalam membentuk arah dan kualitas pendidikan nasional. Melalui kebijakan yang tepat, pendidikan dapat diarahkan untuk menghasilkan SDM yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan daya adaptasi yang tinggi. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masa depan dan karakteristik generasi Z sebagai subjek utama pendidikan saat ini (Tilaar & Nugroho, 2016)



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non- produktif. Momentum ini akan mencapai puncaknya pada periode 2030-2040, tepat menjelang Indonesia Emas 2045(Bappenas, 2019). Oleh karena itu, mengembangkan bakat melalui kebijakan pendidikan yang terintegrasi dan progresif sangat penting untuk memaksimalkan potensi bonus demografis.

Peran Kebijakan Pendidikan dalam Menciptakan SDM Unggul

Kebijakan pendidikan memainkan peran strategis dalam menciptakan visi negara Indonesia untuk mencapai cita-cita Indonesia emas 2045. Berdasarkan analisis literatur, ada beberapa aspek kebijakan pendidikan yang berkontribusi pada pembentukan SDM unggul, seperti:

1. Kebijakan Pengembangan Kompetensi Abad 21

Kompetensi abad ke-21, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi (4C), merupakan fokus utama kebijakan pendidikan kontemporer. Trilling dan Fadel(2009) menekankan bahwa penguasaan kemampuan ini merupakan kebutuhan mendasar untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memasukkan kompetensi tersebut ke dalam kurikulum mandiri sebagai pengembangan dari kurikulum 2013, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global yang semakin kompleks(Kemendikbudristek, 2022).

Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi abad 21 tercermin dalam berbagai program seperti pembelajaran berbasis proyek, pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dan pengembangan pemikiran tingkat tinggi (higher-order thinking skill). Melalui metode pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya menguasai muatan akademik namun juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkannya dalam dunia kerja di masa depan.

Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama kesenjangan infrastruktur dan kapasitas guru. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan seringkali lebih siap menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi abad ke- 21 dibandingkan sekolah-

Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

sekolah di daerah pedesaan atau daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas.

2. Memperkuat kebijakan pendidikan karakter

Pembentukan sumber daya manusia unggul tidak hanya menyangkut aspek kognitif dan keterampilan teknis saja, namun juga pembentukan karakter. Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui koordinasi hati, emosi, pikiran dan gerak. PPK menitikberatkan pada lima nilai karakter utama, yaitu agama, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

Nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik di dalam, di luar maupun di luar kelas. Melalui pendekatan holistik ini, siswa diharapkan tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga karakter yang kuat dan nilai-nilai positif. Penerapan PPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Model pendidikan tiga pusat ini menyadari bahwa pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi semua pihak. Dalam konteks sumber daya manusia yang unggul, karakter yang kuat merupakan landasan penting dalam menghadapi tantangan global dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Membangun Kesadaran Generasi Z sebagai Agen Perubahan

Generasi Z mempunyai potensi besar sebagai agen perubahan dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif dan progresif. Berdasarkan analisis literatur, terdapat beberapa strategi untuk menciptakan kesadaran generasi Z sebagai agen perubahan:

1. Pendidikan Kewarganegaraan Digital

Pendidikan kewarganegaraan digital adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membekali Generasi Z dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka perlukan untuk berpartisipasi aktif dalam ruang digital. Ribble (2015) mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai norma perilaku yang pantas dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi, namun juga pada aspek etika, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di dunia digital. Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2007) menekankan bahwa rakyat digital yang baik



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga tahu akibat sosial, politik, dan ekonomi asal teknologi tadi.

Melalui pendidikan kewarganegaraan digital, generasi Z dilatih buat menjadi masyarakat digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Mereka dibekali menggunakan kemampuan buat mengevaluasi gosip, menghormati privasi, melindungi data eksklusif, dan berpartisipasi pada diskusi publik secara konstruktif. Kemampuan ini menjadi modal penting bagi generasi Z buat berperan menjadi agen perubahan pada era digital (Jones & Mitchell, 2016). Program mirip "Internet Sehat serta aman" (manusia) yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah contoh upaya buat menciptakan pencerahan generasi Z perihal penggunaan internet yg bertanggung jawab. program ini meliputi edukasi tentang etika berinternet, keamanan data, serta pencegahan sikap negatif mirip cyberbullying dan penyebaran hoaks (Kominfo, 2021).

2. Pelibatan dalam Proses Kebijakan Pendidikan

Generasi Z perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mirip forum diskusi, konsultasi publik, dan pembentukan dewan siswa atau mahasiswa yg berperan menjadi perwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Hart (2013) menegaskan bahwa partisipasi aktif pemuda dalam pengambilan keputusan adalah hak serta kebutuhan esensial buat pembangunan demokrasi yg berkelanjutan. Pelibatan generasi Z dalam proses kebijakan pendidikan memiliki beberapa manfaat. Pertama, hal ini memungkinkan pengambil kebijakan buat memahami perspektif dan kebutuhan generasi Z menjadi subjek primer pendidikan. kedua, hal ini menyampaikan kesempatan bagi generasi Z buat membuatkan pemahaman wacana proses kebijakan serta tantangan pada implementasinya. Ketiga, hal ini mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab generasi Z terhadap kebijakan pendidikan yang dihasilkan (Wong, Zimmerman, & Parker, 2010).

Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Generasi Z

Generasi Z tumbuh dalam era digital dan memiliki karakteristik unik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang tepat dan inovatif sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan peluang di masa depan,

1. Transformasi Metode Pembelajaran

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan pendidikan adalah transformasi metode pembelajaran. Generasi Z dikenal sebagai digital natives yang sangat akrab dengan teknologi. Kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi ke pada sistem pendidikan, seperti penggunaan platform e-learning dan metode gamifikasi, menyampaikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif serta menyenangkan. dengan adanya akses ke banyak sekali asal belajar digital, peserta didik bisa belajar secara mandiri dan fleksibel sesuai menggunakan kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya menaikkan motivasi belajar namun pula mempersiapkan mereka buat menghadapi global kerja yang semakin berbasis teknologi.

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kebijakan pendidikan yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi juga sangat penting. Program-program seperti Sekolah Unggulan Garuda dan wajib belajar 13 tahun bertujuan untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Dengan memastikan bahwa generasi muda menyelesaikan pendidikan menengah, pemerintah berupaya membentuk talenta unggul yang siap bersaing di pasar global. Selain itu, program-program khusus untuk siswa berbakat dapat membantu mengembangkan potensi individu secara optimal.

Berdasarkan pembahasan pada essay berjudul “Peranan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan keunggulan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045”, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai peran strategis dan mendasar dalam menciptakan keunggulan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi pilar Indonesia Emas 2045. Kebijakan pendidikan yang inklusif, progresif dan berorientasi masa depan merupakan prasyarat bagi transformasi sumber daya manusia di Indonesia. Dalam konteks



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

pengembangan kesadaran Generasi Z sebagai agen perubahan, artikel ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Generasi Z adalah generasi yang adaptif terhadap teknologi, kritis dan transformatif, serta mempunyai potensi besar dalam mendorong inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dampak kebijakan pendidikan terhadap perjalanan Generasi Z menuju Indonesia Emas 2045 terlihat pada terbentuknya sumber daya manusia yang tidak hanya dibekali kemampuan akademis yang unggul tetapi juga keterampilan abad 21, literasi digital, dan karakter yang kuat. Kebijakan pendidikan yang tepat akan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan menjadi motor penggerak kemajuan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pengambil kebijakan pendidikan dan Generasi Z dalam menerapkan kebijakan pendidikan transformatif menjadi kunci keberhasilan Indonesia mencapai visi “Indonesia Emas 2045” melalui sumber daya manusia berkualitas yang berdaya saing global.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hart, R. A. (2013). *Children's Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Sustainability*. New York: UNICEF.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063-2079.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. Cambridge: MIT Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045*. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/pendidikan-indonesia-menuju-indonesia-emas-2045/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka Dilaksanakan secara Mandiri di Tahun Ajaran Baru 2022/2023*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/30/kurikulum-merdeka-dilaksanakan-sekara-mandiri-di-tahun-ajaran-baru-20222023>
- Kominfo. (2021). *Siaran Pers No. 54/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bangun Literasi Digital dengan 4 Pilar, Menkominfo Realisasikan untuk Indonesia Digital Nation*



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.).

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools*. International Society for Technology in Education.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, A. (2016). *Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Wong, C. J., Zimmerman, S., & Parker, D. (2010). *Youth Participation in Decision Making: A Review of the Literature*. *Journal of Community Psychology*, 38(6), 793-810.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

PERAN GENERASI Z DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN HUKUM YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Dea Lola Syahrani, Essay
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Indonesia menargetkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini adalah sistem hukum yang berlandaskan keadilan dan integritas. Dalam konteks ini, Generasi Z— yang akan menjadi tulang punggung bangsa pada tahun 2045 memiliki peran strategis dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan berintegritas. Dengan karakteristik yang melek teknologi, kritis, dan aktif dalam isu-isu sosial, Generasi Z dapat menjadi aktor kunci dalam pengawasan pelaksanaan hukum di Indonesia. Peran mereka tidak hanya sebatas sebagai penerima kebijakan hukum, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak reformasi hukum yang lebih baik.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan terciptanya masyarakat yang berkeadilan dengan supremasi hukum yang kuat. Dalam hal ini, Generasi Z memiliki peran vital untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan dapat berjalan dengan adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Untuk mewujudkan hal ini, Generasi Z harus memahami konsep hukum yang berintegritas, yakni hukum yang diterapkan tanpa diskriminasi, bebas dari intervensi politik, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Generasi Z dapat mengambil peran aktif dalam advokasi hukum, mengawasi kebijakan publik, serta mendorong keterbukaan informasi dalam proses legislasi. Dengan kemajuan teknologi, mereka dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil serta menyebarluaskan informasi mengenai hukum kepada masyarakat luas. Selain itu, mereka juga dapat bergabung dengan berbagai organisasi hukum yang bergerak dalam isu-isu keadilan sosial untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan sistem peradilan.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Selain itu, partisipasi aktif dalam pemantauan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak integritas sistem hukum di Indonesia. Generasi Z dapat menekan pemerintah agar melakukan reformasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel dengan cara terlibat dalam forum diskusi hukum, seminar, maupun gerakan sosial yang mendukung transparansi hukum.

Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang adil dan berintegritas. Kesadaran ini dapat dibangun melalui berbagai metode, seperti pendidikan hukum yang lebih inklusif, keterlibatan dalam organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu hukum, serta pelaksanaan diskusi dan kajian akademik mengenai penegakan hukum.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir kritis mahasiswa terkait supremasi hukum. Dengan memberikan akses terhadap literatur hukum dan studi kasus mengenai keberhasilan serta kegagalan sistem hukum di Indonesia, mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum seharusnya ditegakkan secara adil. Selain itu, mata kuliah yang berkaitan dengan etika hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia juga perlu ditekankan agar mahasiswa memiliki perspektif yang lebih luas mengenai sistem hukum yang berintegritas.

Selain melalui pendidikan formal, mahasiswa juga dapat meningkatkan kesadaran hukum melalui partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), komunitas advokasi hukum, dan forum diskusi yang membahas isu-isu hukum terkini. Dengan terlibat dalam organisasi tersebut, mahasiswa dapat lebih memahami peran mereka dalam mengawasi jalannya hukum serta menemukan strategi yang efektif dalam menekan pemerintah untuk menjalankan hukum secara adil.

Di era digital saat ini, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi mengenai hukum kepada masyarakat. Melalui media sosial, blog, dan platform diskusi daring, mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses hukum. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya supremasi hukum dan turut serta dalam pengawasannya.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk budaya hukum yang berlandaskan keadilan dan integritas. Dalam menciptakan budaya hukum yang sehat, mahasiswa dapat berperan sebagai pelopor dalam mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan mahasiswa adalah dengan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan etika hukum dalam aktivitas akademik, seperti tidak melakukan plagiarisme, menolak praktik suap dalam sistem pendidikan, dan menghormati peraturan kampus, mahasiswa dapat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum harus dimulai dari lingkungan terkecil. Jika nilai-nilai ini sudah tertanam dalam kehidupan kampus, maka akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk membawa perubahan dalam skala yang lebih luas setelah mereka lulus.

Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan hukum yang lebih baik. Dengan menjadi bagian dari forum diskusi publik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta aktif dalam kegiatan advokasi, mahasiswa dapat memastikan bahwa sistem hukum yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat. Mereka juga bisa mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya kebijakan yang dibuat untuk kepentingan politik tertentu.

Gerakan sosial yang dipimpin oleh mahasiswa juga dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa sering kali menjadi aktor utama dalam perubahan sosial di Indonesia, seperti pada Reformasi 1998. Dengan semangat yang sama, mahasiswa saat ini dapat menggunakan kekuatan mereka untuk terus mengawal demokrasi dan hukum agar tetap berjalan di jalur yang benar.

Dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, peran Generasi Z dalam pengawasan hukum sangatlah krusial. Dengan memanfaatkan teknologi, membangun kesadaran kolektif, serta mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, Generasi Z dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan berintegritas.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Mahasiswa, sebagai bagian dari Generasi Z, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum serta menciptakan budaya hukum yang sehat di masyarakat. Diperlukan sinergi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, Generasi Z dapat membantu mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan demokratis, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, sudah saatnya Generasi Z mengambil peran aktif dalam pengawasan hukum, karena masa depan Indonesia berada di tangan mereka.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

MENJADI SUARA KEADILAN: PERAN GENERASI Z DALAM PENGAWASAN HUKUM INDONESIA

Oleh: Dwi Ardhani, Essay

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam dan keragaman budaya, yang saat ini berada di persimpangan sejarah untuk mencapai tujuan yang disebut sebagai "Indonesia Emas" pada tahun 2045. Tujuan ini mencakup pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan keadilan dan integritas penegakan hukum. Sampai saat ini masih banyak sekali "tikus berdasi" yang berkeliaran di ranah pemerintahan. Ketidakadilan juga merajalela dan terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah seringkali menyuarakan bagaimana pentingnya keadilan namun kenyataan yang terjadi sebaliknya.

Baru – baru ini terbongkar banyak kasus yang melukai hati masyarakat Indonesia terutama di kalangan menengah ke bawah. Kasus tersebut meliputi korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun dan korupsi PT Pertamina dengan dugaan kerugian sebesar 193 triliun. Bagaimana masyarakat tidak terluka, mereka bekerja setiap hari banting tulang sedangkan oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab menikmati kekayaan dari hasil menipu.

Oleh karena itu peran generasi Z saat ini penting dalam hal pelaksanaan hukum yang adil dan berintegritas. Generasi Z adalah anak yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang akrab dengan teknologi dan informasi, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen informasi dan opini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana generasi Z dapat berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan berintegritas, serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Penjelasan lebih lanjut, generasi Z memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan merupakan komponen penting dalam pengawasan hukum. Mereka dapat dengan cepat mengetahui hak-hak dan isu-isu keadilan yang terjadi di sekitar mereka berkat ketersediaan informasi yang luas melalui internet dan media sosial.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Jika mereka tidak memahami hukum dengan baik, sulit bagi mereka untuk berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kesadaran ini sangat penting.

Selanjutnya generasi Z telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum daripada generasi milenial. Hal itu karena di tahun 1981 – 1996 di mana generasi milenial lahir teknologi belum begitu maju, berbeda dengan generasi Z di mana pendidikan hukum yang mudah diakses melalui platform digital seperti YouTube, blog, dan media sosial. Mereka memperoleh pemahaman tentang cara hukum dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan, serta tentang berbagai masalah, mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kampanye kesadaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan ini.

Generasi Z tumbuh dalam era digital, di mana teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengawasi pelaksanaan hukum, melaporkan pelanggaran hukum, mengumpulkan data, dan menyebarkan berita tentang ketidakadilan. Penggunaan situs web dan aplikasi pelaporan pelanggaran hukum sebagai contohnya. Masyarakat dapat secara anonim melaporkan tindakan yang tidak adil melalui platform ini.

Aktivisme Gen Z ini biasanya juga berbentuk kampanye online yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka. Gerakan tersebut seperti membuat tagar #PeringatanDarurat dan #KaburAjaDulu adalah contoh ungkapan demonstrasi masyarakat yang dibuat oleh generasi Z karena kekecawaan mereka terhadap isu – isu politik dan ketidakadilan yang terjadi. Gerakan-gerakan seperti ini juga mulai muncul di Indonesia, di mana Generasi Z berperan penting dalam menyusun gerakan dan menyuarakan aspirasi mereka tanpa harus berdemo dan merusak fasilitas publik. Cara ini terbukti bisa merubah keputusan pemerintah karena ketidakadilan yang viral akan merusak citra integritas pemerintah yang adil dan tidak memihak di mata masyarakat.

Partisipasi politik juga bagian penting dari peran Generasi Z. Partisipasi dengan menjadi pemilih yang aktif dan pintar, mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

publik seperti penegakan hukum. Data dari CNBC news menyebutkan bahwa mayoritas pemilih dalam pemilu tahun ini 55 – 60 persen berasal dari generasi Z. Masa depan Indonesia dapat diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran akan hak suara dan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen pada keadilan hukum. Pilihan tersebut akan menentukan nasib seluruh masyarakat Indonesia kedepannya. Bagaimana jadinya negara ini kalau pemimpin yang dipilih bukan benar – benar berasal dari hati rakyat namun karena uang sogokan yang sering diberikan. Oleh karena itu generasi Z harus dididik untuk memahami proses politik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memberi tahu orang lain tentang apa yang mereka pikirkan.

Generasi Z juga memiliki potensi untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat pengawasan hukum. Melalui kemitraan ini, mereka dapat melakukan penelitian, advokasi, dan penyuluhan mengenai isu-isu hukum yang dihadapi masyarakat. Keterlibatan dalam program magang atau kerja sama dengan lembaga peradilan dapat memberikan pengalaman langsung bagi generasi Z. Hal ini akan memperluas wawasan mereka tentang sistem hukum dan memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam penegakan hukum secara nyata. Misalnya, mereka dapat berkontribusi dalam proyek-proyek penelitian yang berkaitan dengan keadilan sosial atau membantu dalam penyuluhan hukum di komunitas mereka.

Terakhir pendidikan hukum yang inklusif dan berbasis teknologi harus menjadi prioritas untuk mempersiapkan Generasi Z menjadi agen perubahan. Kurikulum yang mengajarkan hak-hak hukum serta kewarganegaraan akan membekali mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pengawasan hukum. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti workshop, seminar, dan kursus online yang mengajarkan tentang sistem hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan hukum dapat membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Generasi Z dapat memanfaatkan platform digital untuk mengakses materi pembelajaran, berdiskusi dengan sesama siswa, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek hukum.

Pendidikan juga harus mencakup pelatihan keterampilan kritis dan analitis, sehingga mereka dapat mengevaluasi informasi hukum dengan baik. Dengan demikian, Generasi Z tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

untuk masalah hukum yang kompleks. Kesimpulannya untuk mencapai keadilan dan integritas, peran Generasi Z dalam pengawasan hukum di Indonesia sangat penting. Mereka dapat menjadi suara keadilan yang kuat dengan kesadaran hukum yang tinggi, keterampilan digital, semangat aktivisme sosial, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Generasi Z memiliki kemampuan untuk mendorong pembentukan sistem hukum yang adil di Indonesia melalui partisipasi aktif dalam proses politik dan pendidikan hukum yang inklusif. Mereka akan menjadi agen perubahan yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik dan berkeadilan jika mereka mengambil tindakan strategis yang tepat. Pada akhirnya, Generasi Z akan membantu mewujudkan visi "Indonesia Emas" pada tahun 2045, di mana hukum ditegakkan secara adil dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Menenun Asa, Menata Bangsa dalam Reformasi Kebijakan Pendidikan Demi SDM Unggul 2045

Oleh: Davina Nathania Lieyanto & Jawza Nur Maulida, Essay

Politeknik Harapan Bersama Tegal

Indonesia kini tengah menapaki jalan menuju satu abad kemerdekaan, tepatnya pada tahun 2045. Di tahun tersebut, Indonesia diproyeksikan menikmati bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Ini adalah peluang besar sekaligus ujian berat. Tanpa sumber daya manusia (SDM) yang unggul, capaian usia emas hanya akan menjadi jargon tanpa makna. Di sinilah pendidikan mengambil peran sentral, bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan sebagai fondasi peradaban.

Namun, potret pendidikan kita masih jauh dari kata ideal. Tantangan dalam peningkatan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih menjadi perhatian. Selain itu, kesenjangan pendidikan antarwilayah juga masih terlihat. Di kota besar, anak-anak mungkin tumbuh dengan akses internet, teknologi, dan guru-guru kompeten. Tapi di pelosok, masih banyak sekolah berdinding kayu dengan fasilitas seadanya. Ketimpangan ini adalah luka lama yang belum sembuh dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Reformasi pendidikan sejatinya telah diupayakan pemerintah, salah satunya melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi. Konsep ini sangat menjanjikan, apalagi di tengah tantangan era digital dan dunia kerja yang semakin dinamis. Namun, kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu mulus dalam pelaksanaan. Banyak guru belum siap dengan pendekatan baru, pelatihan sering kali bersifat satu arah, dan tidak semua sekolah memiliki kapasitas yang sama untuk mengadopsi perubahan. Akibatnya, semangat Merdeka Belajar belum sepenuhnya menjelma menjadi praktik pembelajaran yang merdeka secara nyata.

Di sisi lain, digitalisasi pendidikan sebagai respons terhadap perkembangan zaman justru memperlihatkan celah besar dalam kesenjangan akses. Saat pandemi memaksa pembelajaran daring, jutaan siswa di daerah terpencil tidak dapat mengikuti pembelajaran karena



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

keterbatasan sinyal dan perangkat. Alih-alih menjadi jembatan, teknologi justru menciptakan jurang yang memisahkan.

Tantangan lain muncul dalam penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi. Diterapkan sejak 2017, sistem ini bertujuan mulia: menghapus stigma sekolah favorit dan meratakan kualitas pendidikan. Namun dalam praktiknya, banyak orang tua memanipulasi alamat demi mendapatkan kursi di sekolah unggulan, sementara siswa berprestasi terpaksa menempuh pendidikan di sekolah yang belum tentu mampu menunjang potensinya. Zonasi, pada akhirnya, menyisakan dilema. Apakah tetap dipertahankan demi pemerataan, atau dievaluasi ulang demi keadilan? Jawabannya bukan pada penghapusan semata, melainkan perbaikan kualitas sekolah secara menyeluruh agar sistem zonasi menjadi masuk akal.

Menuju 2045, kebijakan pendidikan Indonesia perlu berani melangkah lebih jauh. Yang dibutuhkan bukan hanya kurikulum baru, tapi juga cara pandang baru. Pendidikan harus dirancang sebagai sistem yang adaptif, merespons kebutuhan lokal dan global sekaligus. Di daerah pesisir, misalnya, pendidikan bisa diarahkan pada potensi maritim. Di wilayah pertanian, keterampilan agrikultur modern bisa menjadi muatan lokal. Pendidikan vokasi pun perlu diarahkan agar selaras dengan dunia kerja dan industri yang terus berubah, termasuk sektor ekonomi hijau dan digital.

Kebijakan afirmatif seperti program “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang sudah mulai dijalankan di beberapa daerah juga patut dipertimbangkan secara nasional. Memberi kesempatan kepada setidaknya satu anak dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi adalah strategi cerdas dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Jika disinergikan dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), maka peluang terbangunnya SDM unggul dari seluruh lapisan masyarakat akan semakin terbuka.

Guru pun tidak boleh dilupakan. Mereka adalah jantung dari sistem pendidikan. Pelatihan berbasis praktik, penguatan komunitas belajar, serta insentif yang layak menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan. Program seperti Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu pendampingan jangka panjang dan pemerataan implementasi agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir sekolah.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Pendidikan yang berkualitas juga harus bersifat inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus, masyarakat adat, dan mereka yang tinggal di daerah tertinggal berhak atas pengalaman belajar yang bermakna. Kebijakan pendidikan ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam. Ia harus menjangkau yang terpinggirkan, menghapus hambatan, dan membuka ruang seluasluasnya bagi semua anak bangsa untuk berkembang sesuai potensinya. Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika SDM-nya unggul secara utuh: cakap berpikir, terampil bekerja, berintegritas, dan berkarakter. Semua itu dibentuk dari proses pendidikan yang menyeluruh, mulai dari rumah, sekolah, hingga lingkungan sosial. Maka dari itu, kebijakan pendidikan bukan lagi isu teknis semata, melainkan urusan strategis yang menentukan wajah bangsa di masa depan. Menenun asa adalah tentang menyulam harapan dari segala tantangan yang ada. Menata bangsa adalah tentang keberanian mengambil keputusan yang visioner dan berkelanjutan. Pendidikan adalah jembatan di antara keduanya yang menghubungkan cita-cita dengan realitas, dan membentuk manusia Indonesia yang tak hanya mampu bersaing, tetapi juga memanusiakan dunia. Jika kita mampu mereformasi pendidikan hari ini dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah kepastian yang sedang dilahirkan.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

PERAN GENERASI Z DALAM TATANAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Ikhsan Arya Mahendra, Essay
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Generasi Z atau disingkat menjadi Gen Z merupakan sebutan untuk generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 yang mana diprediksi akan menjadi generasi mayoritas dalam struktur demografi Indonesia pada tahun 2045. Dengan menjadi generasi mayoritas, keterlibatan Gen Z tentu sangat penting untuk menentukan arah masa depan bangsa. Indonesia sendiri memiliki visi besar pada tahun 2045 dalam rangka 100 tahun Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045 yang memiliki 5 sasaran yaitu; pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission. Dalam menuju visi tersebut Gen Z sebagai generasi melek digital memiliki peran penting khususnya dalam tatanan politik dan kebijakan publik.

Gen Z memiliki peran sebagai penegak demokrasi yang sehat dan transparan dengan meningkatkan partisipasi dalam pemilu melalui hak pilih secara bijak serta mendukung kandidat yang memiliki visi dan program yang mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, suara dari Generasi Z dan Milenial mencakup lebih dari 50% dari total pemilih. Data ini menunjukkan bahwa suara mereka sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan negara.

Selain itu, keterlibatan dalam organisasi politik dan kepemudaan juga menjadi langkah agar Gen Z dapat menyuarakan aspirasi dengan lebih efektif. Seperti organisasi seperti Indonesian Youth Diplomacy (IYD) yang secara aktif mengadvokasi kebijakan luar negeri dan keterlibatan pemuda dalam diplomasi.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi komunikasi juga menjadi alternatif untuk meningkatkan transparansi pemerintahan, misalnya melalui platform pengaduan publik seperti LAPOR! yang memungkinkan masyarakat mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Gen Z juga berperan aktif membantu menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau black campaign dengan munculnya berbagai komunitas fact-checking seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang menunjukkan bahwa Gen Z berperan dalam menangkal disinformasi yang merugikan demokrasi.

Gen Z juga kerap mengajukan petisi, mengadakan audiensi dengan DPR/DPRD, serta memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan kritik dan solusi terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu contoh sukses dari keterlibatan pemuda dalam kebijakan adalah gerakan #ReformasiDikorupsi yang dilakukan mahasiswa pada tahun 2019 sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Pemanfaatan media sosial media ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik, misalnya dengan menciptakan konten edukatif tentang kebijakan publik dan sistem pemerintahan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Misalnya, akun-akun seperti Asumsi dan Narasi Newsroom telah berhasil menarik minat anak muda dalam memahami politik melalui format yang lebih menarik dan mudah dipahami guna mengkritisi kebijakan secara konstruktif sebagai bagian dari kesadaran politik yang perlu dikembangkan.

Sebagai calon pemimpin masa depan, Gen Z juga berperan dalam pengambilan kebijakan dengan menjadi bagian dari pemerintahan mulai tingkat desa hingga nasional, yang akan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan negara seperti Billy Mambrasar, seorang pemuda Papua yang ditunjuk sebagai staf khusus Presiden untuk isu-isu kepemudaan dan inovasi.

Selain itu, mereka juga dapat membangun start-up dan inovasi teknologi untuk kebijakan publik, dengan mengembangkan aplikasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan seperti aplikasi KawalPemilu yang dibuat oleh sekelompok anak muda yang berhasil membantu masyarakat dalam memantau hasil pemilu secara independen dan transparan. Gen Z juga menggunakan data dan penelitian sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik serta berkolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk mendukung riset, inovasi, dan kebijakan berbasis bukti seperti program data-driven policy yang diinisiasi oleh beberapa lembaga think-tank seperti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) telah



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

mendorong kebijakan yang lebih berbasis bukti dan dampak nyata bagi masyarakat.

Generasi Z memiliki peran penting dalam membangun Indonesia Emas 2045 dalam tatanan politik dan kebijakan publik melalui partisipasi politik yang sehat, kesadaran akan dampak kebijakan publik, dan kontribusi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, meningkatkan literasi politik, serta terlibat langsung dalam pemerintahan dan organisasi kepemudaan, Generasi Z dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju bangsa yang lebih maju, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan visi Indonesia emas 2045. Dengan keterlibatan anak muda dalam politik dan kebijakan publik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Gen Z memiliki andil besar dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Dimas Junian Fadhillah & Hafids Haryonno, Essay

Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Di tengah kompleksitas dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, peran Generasi Z di Indonesia semakin signifikan dalam menentukan arah masa depan negara. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital, mereka memiliki akses yang luas terhadap informasi dan perkembangan teknologi, yang memungkinkan keterlibatan mereka yang lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, adalah generasi yang sangat terhubung dengan berbagai platform digital.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, jumlah penduduk Indonesia yang berusia antara 15 hingga 34 tahun mencapai 89 juta jiwa, atau sekitar 41 persen dari total populasi Indonesia yang berjumlah 215,4 juta jiwa. Dengan proporsi yang besar ini, Generasi Z memegang peranan penting dalam mempengaruhi arah kebijakan publik dan struktur politik Indonesia di masa depan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan sistem politik yang telah mapan dan, yang lebih penting, bagaimana memastikan keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan politik.

Generasi Z di Indonesia tidak dapat dengan mudah dipahami atau digolongkan dalam kategori ideologi politik tradisional. Mereka lebih tertarik pada isu-isu yang lebih kontemporer dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang berdampak langsung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar mereka. Sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan informasi, mereka memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumber informasi secara global dalam waktu nyata, yang memungkinkan mereka untuk memahami isuisu global sekaligus mengkritisi sistem politik dan sosial yang ada.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Pembahasan dan Analisis

Generasi Z telah mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam memahami politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya melihat politik sebagai proses parlementer atau pemilihan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan institusi pendidikan, lingkungan profesional, dan interaksi di platform digital. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal tata kelola pemilu Indonesia, dijelaskan bahwa Generasi Z sangat aktif mencari informasi politik melalui media sosial (N Evita, 2023). Mereka memandang politik bukan sebagai medan pertarungan ideologi, tetapi lebih sebagai alat untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan politik mereka lebih pragmatis, berfokus pada pencarian solusi praktis untuk isu-isu yang relevan dan langsung berdampak pada kehidupan mereka.

Karakteristik politik Generasi Z juga tercermin dalam kecenderungan mereka untuk lebih fokus pada isu-isu yang bersifat aktual, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Isu-isu ini lebih menjadi perhatian utama mereka daripada ideologi politik tradisional. Politik bagi mereka tidak lagi dipandang sebagai arena perdebatan ideologi, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih praktis dan berdampak langsung. Selain itu, Generasi Z sangat aktif di dunia maya, khususnya di media sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama bagi mereka untuk terlibat dalam diskusi politik, berpartisipasi dalam percakapan publik, dan mengorganisir gerakan sosial. Mereka lebih tertarik untuk mengikuti isu yang viral dan mendapat perhatian luas daripada program politik yang kurang mendapat perhatian. Ini menunjukkan bahwa politik Generasi Z lebih responsif terhadap isu yang berkembang cepat dan mencerminkan kebutuhan mereka yang terus berubah.

Guna mengoptimalkan partisipasi Generasi Z dalam pengambilan keputusan politik menuju Indonesia Emas 2045, ada beberapa langkah dapat diterapkan. Pertama, pendidikan kewarganegaraan dan etika politik perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih relevan bagi generasi digital. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan teknologi digital dan media sosial dapat meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi aktif Generasi Z dalam demokrasi (Wijaya, M., 2024). Kurikulum juga perlu diperbarui agar mencerminkan realitas



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

digital yang mereka hadapi, sehingga dapat meningkatkan kualitas partisipasi dalam pemilu dan mendukung proses demokrasi yang lebih damai (Ajusman, A., dkk., 2024). Selain itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga menjadi hal yang penting dalam membangun karakter generasi emas yang cerdas dan beretika (Permatasari, M., 2022). Pendidikan Pancasila yang dilakukan melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat berperan dalam membentuk mentalitas dan karakter generasi muda yang lebih bertanggung jawab (Masykur, Z., 2024).

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan media sosial menjadi kunci utama dalam meningkatkan keterlibatan politik Generasi Z. Mengingat mereka aktif di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok, maka partai politik serta KPU perlu memanfaatkan media ini dengan menyajikan konten menarik seperti podcast, meme, dan humor politik guna meningkatkan partisipasi mereka (Dewi, E., 2023). Selain itu, pengembangan aplikasi digital seperti E-Konstituen juga dapat menjadi solusi untuk menyediakan ruang partisipasi yang lebih luas dalam demokrasi digital, sekaligus mengatasi keterbatasan yang ada pada media sosial (Ramadhan, A., 2022).

Terakhir, keterlibatan langsung dalam proses demokrasi juga perlu didorong agar Generasi Z tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam pengambilan keputusan politik. Memberikan mereka ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik dapat meningkatkan kesadaran politik serta rasa memiliki terhadap sistem demokrasi (Silva, S., 2021). Dengan kombinasi pendidikan yang relevan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan keterlibatan dalam proses politik, Generasi Z dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Keahlian teknologi Generasi Z juga memengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam politik. Tumbuh dalam dunia yang terhubung dengan internet dan media sosial memberikan mereka akses tak terbatas ke berbagai informasi, yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis dan menganalisis isu-isu yang kompleks. Kemampuan ini sangat penting untuk membuat keputusan politik yang terinformasi dan rasional. Perubahan dalam hal partisipasi politik ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara Generasi Z memandang hubungan antara negara dan masyarakat, di mana mereka menginginkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mampu berkomunikasi dengan baik melalui saluran yang mereka kenal, yaitu media sosial dan platform digital lainnya.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Konklusi dan Penutup

Melihat perkembangan ini, perlu ada perubahan dalam strategi partai agar sesuai dengan selera dan cara pandang Generasi Z. Partai politik harus menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka dan sesuai dengan cara berkomunikasi yang mereka kenal, seperti melalui media sosial dan diskusi publik secara online. Pendidikan politik yang relevan dan mudah diakses juga sangat penting untuk membekali Generasi Z dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan bagaimana mereka dapat berperan di dalamnya. Dalam hal ini, penting untuk tidak hanya melihat mereka sebagai pemilih, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki peran besar dalam membentuk kebijakan publik.

Mengoptimalkan partisipasi Generasi Z dalam pengambilan keputusan politik menuju Indonesia Emas 2045 dapat membekali mereka dalam menentukan arah kebijakan publik di masa depan. Dengan kemampuan mereka dalam mengakses informasi secara global dan berpikir kritis terhadap isu-isu yang kompleks, Generasi Z memiliki kapasitas untuk berperan dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data. Oleh karena itu, pemerintah dan partai politik perlu beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang lebih terbuka dan menggunakan platform digital yang sudah akrab dengan Generasi Z untuk membangun dialog yang lebih konstruktif.

Mengintegrasikan suara Generasi Z dalam pengambilan keputusan politik akan memperkaya proses demokrasi dengan perspektif baru yang lebih progresif dan relevan dengan tantangan global dan lokal saat ini. Partisipasi aktif mereka tidak hanya akan memastikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi mendatang, tetapi juga mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika politik global di masa depan. Dengan demikian, peran Generasi Z dalam pengambilan keputusan politik harus dioptimalkan agar Indonesia dapat meraih visi Indonesia Emas 2045 dengan keberagaman ide, solusi, dan partisipasi yang konstruktif.

Partai politik dan politisi yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan ini berisiko semakin terpinggirkan dari perhatian Generasi Z. Dengan langkah-langkah yang tepat, Generasi Z dapat menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan politik,



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan politik dan kebijakan publik di Indonesia.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

DAFTAR PUSTAKA

Ajusman, A., Achadi, M., & Baroroh, N. (2024). Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Mahasiswa Generasi Z. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6002>

Data BPS Tahun 2024. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Golongan Umur. Online, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzE1IzI=/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>

Dewi, E., Arifin, H., & Fuadi, I. (2023). *Nurturing Political Engagement: Political Communication Strategies for Generation Z in the Lead-up to the 2024 Election in West Java*. *The Journal of Society and Media*. <https://doi.org/10.26740/jsm.v7n2.p370-388>

Evita, N. (2023). Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5 (1), 47-66.

Masykur, Z. (2024). Pancasila Philosophy and Its Contribution to the Development of Golden Indonesia 2045. *Jurnal Dinamika*. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.81-104>

Permatasari, M., & Murdiono, M. (2022). *The Urgency of Political Ethics of Pancasila for The Millennial Generation Towards Golden Indonesia 2045*. *European Journal of Social Sciences Studies*. <https://doi.org/10.46827/ejsss.v7i4.1253>

Ramadhan, A., Utama, I., & Arkan, J. (2022). *E-Konstituen*: Inovasi Aplikasi Digital Berbasis Digital Operating System Untuk Meningkatkan Peran Generasi Muda di Era Demokrasi Digital. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i1.17068>

Silva, S., & Pandin, M. (2021). *Book Review: Millenial and Generation Z Ideas for Golden Indonesia 2045* (Gagasan Millenial dan Generasi Z untuk Indonesia Emas 2045). <https://doi.org/10.31235/osf.io/j6s3c>

Wijaya, M., & Amalia, H. (2024). *Enhancing Political Participation through Civic Education: Integrating Digital and Social Media for Peaceful Elections among Generation Z in Indonesia*. *Global Educational Research Review*. <https://doi.org/10.71380/gerr-08- 2024-9>



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Sekolah Bukan Pabrik, Murid Bukan Produk: Merancang Kebijakan Pendidikan yang Molahirkan SDM Unggul

**Oleh: Utria Windi Arsih & Siti Zahra Yundi Afi, Essay
Politeknik Harapan Bersama**

Pendidikan memegang peran kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing tinggi. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah pendekatan pendidikan yang terlalu kaku dan mekanistik, di mana sekolah sering diperlakukan layaknya pabrik yang menghasilkan lulusan dengan standar seragam. Dalam model ini, siswa seakan-akan dianggap sebagai produk yang harus memiliki keseragaman dalam capaian akademik, tanpa mempertimbangkan potensi unik, minat, dan bakat masing-masing individu. Sistem seperti ini tidak hanya membatasi kreativitas siswa, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap individu agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat dan bangsa.

Untuk menghasilkan SDM yang benar-benar berkualitas, kebijakan pendidikan harus disusun agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum yang diterapkan di sekolah harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan dunia industri. Saat ini, banyak sistem pendidikan masih berorientasi pada hafalan dan nilai ujian sebagai tolak ukur keberhasilan, padahal dunia kerja dan kehidupan nyata menuntut keterampilan yang lebih kompleks, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus lebih berbasis proyek, studi kasus, dan eksperimen langsung yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara mendalam dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Selain itu, tenaga pendidik harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar mereka dapat membimbing siswa secara efektif dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Selain relevansi kurikulum, pemerataan akses pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM unggul. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Fasilitas sekolah yang kurang memadai, minimnya tenaga pendidik, serta keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi hambatan utama bagi banyak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus menekankan pada pemerataan akses, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, maupun penyediaan teknologi pendidikan yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Misalnya, pemerintah dapat memperluas program sekolah digital atau pembelajaran daring yang memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan dari guru-guru terbaik tanpa harus terbatas oleh faktor geografis.

Pendidikan juga tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi harus memperhatikan pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam dunia yang semakin dinamis, siswa perlu memiliki fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan serta tantangan yang tidak terduga. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menanamkan nilai-nilai seperti integritas, empati, kerja sama, serta rasa tanggung jawab sosial. Program ekstrakurikuler, kegiatan berbasis komunitas, serta pembelajaran berbasis pengalaman harus lebih diperbanyak agar siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan wawasan dan keterampilan yang lebih luas dari interaksi sosial dan lingkungan sekitar.

Sebagai generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, Generasi Z memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung sistem pendidikan yang lebih inovatif dan inklusif. Kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan harus ditingkatkan, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor perubahan. Di era digital seperti sekarang, generasi ini memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan pendidikan. Mereka dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyuarakan gagasan serta mendorong inovasi dalam dunia pendidikan.

Selain itu, sistem pendidikan harus membentuk generasi yang mandiri dalam belajar dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran tidak boleh terbatas pada hafalan teori,



Slamet Riyadi Conference On Public Administration (SRIPA) 2025

tetapi harus mampu mengasah kemampuan analitis, pemecahan masalah, dan inovasi. Literasi digital juga menjadi faktor penting dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era globalisasi. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif, seperti pengembangan ide-ide kreatif, kewirausahaan, dan advokasi terhadap

kebijakan pendidikan yang lebih baik. Kebijakan pendidikan yang tepat akan berdampak besar pada masa depan Generasi Z, terutama dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global. Sistem pendidikan yang adaptif dan relevan akan membantu mereka menjadi individu yang siap kerja, inovatif, dan mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri. Pendidikan yang berkualitas juga akan memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia industri serta menyesuaikan diri dengan dinamika pasar kerja yang terus berkembang. Dalam konteks ini, program seperti pendidikan vokasi, magang industri, dan pelatihan berbasis keterampilan harus lebih diperkuat agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu berinovasi dan berwirausaha.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial dan geografisnya, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu saja.

Selain aspek ekonomi dan sosial, kebijakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberlanjutan juga sangat penting dalam membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan, sosial, dan budaya. Kesadaran terhadap isu keberlanjutan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan warisan budaya bangsa. Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, generasi mendatang tidak hanya akan fokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan bumi dan lingkungan sekitarnya.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, kebijakan pendidikan juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Pemanfaatan kecerdasan buatan, pembelajaran berbasis digital, dan integrasi teknologi dalam sistem pendidikan harus dioptimalkan agar peserta didik dapat lebih siap menghadapi persaingan global. Selain itu, pendidikan harus membangun pola pikir inovatif dan adaptif, sehingga generasi muda dapat terus berkembang dan menciptakan solusi bagi berbagai tantangan di masa depan. Pendidikan harus mencetak SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan peduli sosial. Sekolah bukanlah pabrik yang menyeragamkan lulusan, melainkan wadah pengembangan potensi individu. Dengan peran aktif Generasi Z dalam mendukung kebijakan pendidikan, Indonesia berpeluang besar mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Husnah, R. (2025). BRANDING IMAGE DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) DALAM PENGUATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI SMA KHADIJAH SURABAYA. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 168–181.
- Arif, K. M. (2021). Strategi membangun sdm yang kompetitif, berkarakter dan unggul menghadapi era disrupsi. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–11.
- Asrohah, H. (2024). *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan*. Academia Publication.
- Baiquni, M. (2025). *Kebijakan Pendidikan Nasional Era Indonesia* Emas-Damera Press.
- Kodrat, H., & Or, S. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Di Wilayah 3t Untuk Melahirkan Sdm Unggul Di Tengah Pandemic Covid-19. *Strategi Peningkatan Sdm Unggul Berdaya*, 45.
- Lukum, A., Paramata, N. R., Achmad, N., & Djafar, N. (2024). *Kebijakan pendidikan, relevansinya dengan pandangan ki hajar dewantoro*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Warits, A. (2023). Analisis Daya Saing Dan Penerapan Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *LENTERA: JURNAL KAJIAN DAN RISET PENDIDIKAN ISLAM*, 1(02), 98–109.
- Widyastuti, A. (2022). *Merdeka Belajar dan Implementasinya: Merdeka GuruSiswa, Merdeka DosenMahasiswa, Semua Bahagia*. Elex Media Komputindo.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

PERAN GENERASI Z DALAM TATANAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Muhammad Isa Apdiyan Wisanggeni, Essay
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Generasi Z atau yang kerap disapa Gen Z merupakan suatu kumpulan generasi orang-orang yang lahir pada rentang tahun 1997-2012. Gen Z sering menjadi topik yang menarik karena mereka tumbuh dalam era digital dan teknologi yang sangat berkembang pesat. Dimana Gen Z sering kali dipandang generasi yang lemah, mudah menyerah, tidak dapat diandalkan dan berbagai doktrin negatif yang selalu mereka dapatkan. Hal ini disebabkan Gen Z tumbuh dimana media sosial sudah dipakai secara luas oleh orang-orang di seluruh dunia, sehingga semua gerak-gerik Gen Z sangat mudah sekali tersorot oleh media maupun sifat positif atau negatif. Belum lagi Gen Z mayoritas dibesarkan oleh orang tua yang sudah terpengaruh paparan globalisasi dimana mendidik anak dengan cara dimanja dan tidak pernah dimarahi populer pada masa para Gen Z ini lahir. Walau begitu harus diakui bahwa Generasi Z merupakan pengurus birokrasi bangsa Indonesia ke depan, dimana hal ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia akan menuju kemajuan atau malah terjadi kemunduran.

Di Indonesia sendiri tatanan politik masih cukup kurang sehat, dimana orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah adalah keluarga, teman, dan kenalan dari pejabat yang sudah berkuasa. Kebijakan publik di negara ini juga sering tidak berpihak kepada masyarakat maupun demokrasi yang sehat, melainkan lebih mementingkan urusan pribadi bagi orang-orang yang berkuasa untuk tetap bisa menjadi berpengaruh walaupun sudah tidak menjadi pejabat lagi. Sebagai contoh ada seorang pejabat yang merubah undangundang negara supaya anaknya bisa maju dalam pemilihan. Ini merupakan masalah yang perlu diatasi jika Indonesia ingin mencapai kemajuan, belum lagi Indonesia mempunyai target “Indonesia Emas 2045” dimana pada tahun tersebut Indonesia mendapat bonus demografi yaitu jumlah pekerja usia produktif lebih banyak daripada yang usia pensiun. Maka dari itulah Gen Z merupakan penentu nasib Indonesia ke depan karena pada tahun 2045 usia Gen Z rata-rata sudah 33-48 tahun, dalam usia tersebutlah Gen Z yang akan mengurus birokrasi



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

pemerintahan di Indonesia entah itu menjadi Kepala Daerah, Menteri, Anggota Dewan, bahkan Presiden. Terdapat pertanyaan : apakah Gen Z dapat berkontribusi untuk berpartisipasi untuk merombak tatanan politik dan kebijakan publik di Indonesia?

Salah satu upaya Gen Z untuk berkontribusi memperbaiki tatanan politik di Indonesia, yaitu dengan terlibat dalam politik yang sehat dan prinsip demokrasi yang transparan, adil dan partisipatif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gen Z dapat berfungsi sebagai pihak pengawas kinerja pemerintah, bisa dengan bekerja di lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah atau dengan menggunakan media sosial secara bijak. Seperti jika terdapat kegiatan seperti KKN, Gen Z dapat melakukan protes dengan turun ke jalan namun dengan tidak menjadi anarkis. Atau contoh lain seperti pemilihan presiden yang digelar pada Februari 2024 lalu, Gen Z dapat berkontribusi dalam membangun politik sehat dengan tidak merendahkan pilihan orang lain yang berbeda. Gen Z perlu sadar akan pentingnya keterlibatan mereka dalam isu ini, yang jadi masalah Gen Z memang terkenal dengan generasi yang malas. Lalu bagaimana membuka kesadaran Gen Z akan pentingnya keterlibatan politik mereka dalam pembangunan bangsa? Terdapat beberapa cara, tentu dapat dilakukan dengan pemberian edukasi kepada generasi penerus tersebut tentang tata politik dan kebijakan publik. Namun itu saja tidak cukup, karena terkenal dengan sifat malas. Maka Gen Z perlu sedikit dipaksa untuk peduli dengan isu-isu sekitar seperti pemberian tugas menganalisis masalah pajak terbaru, jika Gen Z tersebut masih sekolah. Untuk pengambilan keputusan tidak kalah pentingnya untuk Gen Z ikut berpartisipasi, Gen Z dapat memberikan saran dan kritik kepada pemerintah entah di situs web pemerintah resmi ataupun pada komen sosial media akun-akun para elite politik. Dan bisa juga terjun langsung menjadi pemerintah seperti menjadi pejabat di bidang eksekutif dan mencalonkan diri untuk bergabung dengan anggota dewan, dengan kata lain menjadi anggota legislatif. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan di Indonesia selain akan meningkatkan tingkat demokrasi, pemerintah akan banyak mendapatkan opsi-opsi alternatif jika keputusan utama yang disepakati bersama gagal.

Kesimpulannya bahwa Gen Z sangat berpengaruh dalam memperbaiki tatanan politik dan pengambilan keputusan di Indonesia dan pengaruhnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan partisipasi dalam politik yang bersih, kesadaran politik yang terbuka, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh negara, optimis Indonesia



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Emas 2045 benar-benar dapat tercapai. Namun jika Gen Z cenderung stagnan dan tidak mengalami kemajuan, misi dan visi Indonesia emas 2045 hanya akan menjadi cerita khayalan saja. Semoga Gen Z di Indonesia sadar betapa penting dan berharganya mereka dan mereka lah yang akan meneruskan untuk mengurus negara ini menuju ke arah kemajuan atau malah kemunduran.





Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

PERAN GENERASI Z DALAM PENGAWALAN PELAKSANAAN HUKUM YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: Andika Umbu Tiba & Ni Luh Putu Ratih Prabandewi, Essay
Universitas Warmadewa

PENDAHULUAN

Peran generasi dalam pengawasan pelaksanaan hukum yang adil dan berintegritas sangat krusial untuk mencapai visi indonesia emas 2045. Generasi z yang lahir antara 1995 hingga 2012, tumbuh dalam era digital yang ditandai dengan akses informasi yang mudah dan cepat. Dalam konteks ini, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, khususnya terkait dengan penegakan kasus hukum. Hukum yang adil dan berintegritas adalah pondasi bagi pembangunan negara yang demokratis dan berkeadilan, serta syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ditengah maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan hukum masih menjadi tantangan utama dalam sistem hukum indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dikalangan generasi muda, terutama generasi z menjadi bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan peduli terhadap keadilan. Dengan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial, generasi z dapat melakukan advokasi, mengawasi pelaksanaan hukum, serta menyebarkan informasi yang akurat dengan cepat. Dalam upaya menuju indonesia emas 2045, generasi ini tidak hanya diharapkan menjadi penerus, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan juga transparan.

ISI

Peran Generasi Z dalam Pengawasan Hukum

Generasi z atau yang dikenal umumnya juga disebut sebagai gen z adalah generasi yang lahir setelah tahun 1995 hingga tahun 2012. Generasi z lahir diera digital dimana teknologi didunia sedang berkembang dengan maju dan pesat. Sebagai generasi yang melek terhadap teknologi, mereka sering melibatkan teknologi dalam aspek kehidupan mereka seperti, mengatur jadwal penting, hiburan, serta alat komunikasi. Hal ini membedakan generasi z dan



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

generasi lainnya. Dimana teknologi telah membentuk karakteristik generasi z, dimulai dari cara mereka berpikir hingga cara mereka berkomunikasi. (Ladamay dkk., 2021).

Pemanfaatan Platform Media Sosial Untuk Transparansi Hukum

Dengan memanfaatkan teknologi atau platform media sosial seperti, instagram, tiktok, dan juga twitter, generasi z dapat membantu dalam pengawalan hukum yang terjadi di indonesia saat ini. Melalui platform media sosial mereka dapat menyuarakan isu-isu yang terjadi, mengakses informasi dengan cepat sudah menjadi keahlian bagi generasi z. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka selalu mencari informasi secara mendalam untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Dengan informasi yang akurat mereka dapat menyuarakan isu-isu hukum yang terjadi. Selain itu generasi z juga dikenal sebagai generasi yang berani, mereka berani untuk menyuarakan atau mengkritisi ketidakadilan hukum yang terjadi melalui platform media sosial dengan membuat konten edukatif, video pendek, ataupun podcast. Dengan kreativitas tersebut mereka dapat mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya hukum.

Edukasi Hukum Melalui Media Sosial

Media sosial kini merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, khususnya generasi z. Penggunaan platform media sosial dengan bijak dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya, namun juga sebaliknya penyalahgunaan sosial media dapat merugikan penggunanya jika tidak digunakan dengan bijak dan benar. Penggunaan media sosial dengan bijak dapat mendatangkan keuntungan bagi penggunanya serta dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum jika dimanfaatkan dengan benar untuk hal positif. Hal inilah yang harus diterapkan oleh generasi z, sebagai generasi yang melek akan teknologi penggunaan media sosial yang bijak akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat yang mengonsumsinya, salah satunya adalah menggunakan media seperti tiktok, instagram, twitter maupun youtube sebagai sarana edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pembuatan konten edukatif, video pendek motivasi dan inspirasi, serta podcast terkait pengetahuan tentang ketentuan hukum dapat menjadi langkah awal bagi generasi z dalam mengedukasi masyarakat dan mengawal hukum yang terjadi di indonesia.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

Tantangan Dan Solusi

Meski memiliki potensi yang besar, generasi z juga menghadapi tantangan, seperti penyebaran hoaks. di era digital, hoax dan berita yang belum valid sering kali tersebar luas dan mudah menggiring opini publik. Oleh karena itu, Generasi Z harus mengembangkan kemampuan literasi digital agar dapat memilah informasi yang akurat dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.

KESIMPULAN

Peran generasi z dalam pengawasan hukum yang adil dan berintegritas sangat penting dalam mewujudkan indonesia emas 2045. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti tiktok, instagram, twitter, dan juga youtube mereka dapat berperan aktif dalam menyuarakan ketidakadilan hukum, memberikan edukasi terkait hukum. Hal ini dapat menjadi langkah awal bagi generasi z dalam mentransaparansi hukum yang adil menuju indonesia emas 2045.



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

SUARA AKTIVIS DALAM MENOLAK RUU TNI DEMI MENJAGA PROFESIONALISME MILITER DAN DEMOKRASI

Oleh: Aprilia Marthen Patabang, Essay

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Kondisi politik Indonesia saat ini sedang caruk maruknya pasalnya, Masyarakat sipil digemparkan dengan adanya isu RUU TNI yang diadakan secara tertutup oleh DPR dan TNI, Masyarakat menolak keras revisi RUU TNI dengan menggunakan Tagline Kembalikan TNI ke barak. para perwira seharusnya menjadi perlindungan yang matang dan siaga bagi keamanan negara, namun kekacauan politik tentang RUU TNI belakangan ini sedikit membuat hati para Masyarakat sipil sedikit goyah, pasalnya masyarakat sipil menyoroti hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Yusa Djuyandi, 2012).

Dengan adanya penolakan dari Masyarakat sipil sudah terlihat secara jelas jika RUU ini sangat mengingkari putusan Makamah Konstitusi di dalam pentingnya pendapat publik herlambang juga mengemukakan hal tersebut bahwa 'proses RUU TNI ini dari pembahasannya saja sudah secara terang-terangan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi soal pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan hukum. "Suara publik berhak didengarkan, dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembentukan hukum (Tempo.co, 2025),"

Negara Indonesia negara yang menganut sistem demokrasi Dimana pendapat Masyarakat lebih dari segalanya, RUU sangat berdampak pada penurunan profesionalisme militer, ketika ini dilanjutkan maka seperti yang dikemukakan oleh Yusa Djuyandi dalam jurnalnya bahwa Ketidakprofesionalan TNI berpotensi membawa militer keluar dari tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan negara, serta dapat menghadirkan kembali pemaksaan militer terhadap masyarakat sipil, sejatinya seorang tentara di persiapkan untuk berperang dan menjaga keamanan negara tidak untuk menguasai jabatan sipil. RUU TNI ini juga dapat mengurangi peluang kerja bagi Masyarakat sipil dan bahkan berpotensi meningkatkan angka penganguran yang lebih tinggi karena dengan ini seorang tni dapat dengan leluasa memegang 2 jabatan dalam satu periode kerjanya terpulang ingin menjadi TNI atau masyarakat sipil,



Slamet Riyadi Conference On Public Administrarion (SRIPA) 2025

sedangkan kita sendiri sudah mengetahui bahwa angka penganguran di Indonesia sudah sangat tinggi, (Yusa Djuyandi, 2012).

Saya sebagai mahasiswa administrasi negara yang sejatinya mempelajari tentang ilmu politik dan ilmu sosial berpendapat bahwa ketika militer kembali menguasai ranah sipil, maka seluruh ilmu yang saya pelajari di FISIP akan kehilangan makna. Karena semuanya akan tunduk kepada satu prinsip dasar militerisme perintah dari atas, harus patuh dan tidak diberikan kesempatan untuk bersuara padahal pada dasarnya kita adalah negara demokrasi yang dimana masyarakatnya bebas bersuara, Bagaimakah kita bisa mengutarakan bahwa negara kita adalah good governance sedangkan negara kita dijalankan dengan komando bukan transparansi, seperti yang dikemukakan Yusa Djuyandi bahwa Banyak peristiwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang menunjukkan ketika pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh kalangan militer maka demokrasi tidak dapat berkembang. (Djuyandi, MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI PROFESIONALISME TENTARA NASIONAL INDONESIA , 2012).